

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI
BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh: Mhd. Iqbal

NIM. 220802100

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mhd. Iqbal
NIM : 220802100
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintah
Tempat/Tanggal Lahir : Kute Lengat Pagan, 31 Desember 2004
Alamat : Kute Lengat Pagan, 31 Desember 2004

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026
Yang Menyatakan,


Mhd. Iqbal
NIM. 220802100



LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tenggara

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1) Pada Program Studi Ilmu

Administrasi Negara

Oleh:

Mhd.Iqbal

220802100

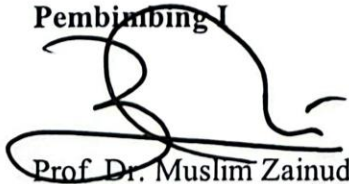
Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyah oleh:

AR - RANIRY

Pembimbing I



Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.

NIP. 196610231994021001

Pembimbing II



Zakki Fuad Khalil, M.Si

NIP199011192022031001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA

Mhd. Iqbal
NIM. 220802100

Telah Diuji Oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai
Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 20 Agustus 2026
Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.
NIP. 196610231994021001

Sekretaris



Zakki Fuad Khalil, M.Si
NIP. 199011192022031001

Penguji I



Muazzinah, B.Sc., MPA
NIP. 198411252019032012

Penguji II



Cut Zamharira, S.IP., M.AP
NIP. 197911172023212012

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muhiyul Mulla, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori partisipasi masyarakat Sherry R. Arnstein yang mencakup tiga tingkatan utama, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara secara umum masih berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat telah dilibatkan dalam bentuk pemberian informasi dan konsultasi, namun belum memiliki kekuasaan nyata dalam pengambilan keputusan. Pada aspek non-participation, masih ditemukan masyarakat yang hanya menjadi objek kebijakan tanpa keterlibatan aktif. Pada tingkat tokenism, masyarakat mulai dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi dan diskusi, namun kontribusi mereka belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan. Sementara itu, pada tingkat citizen power, partisipasi masyarakat masih sangat terbatas dan belum berkembang secara optimal. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana, keterbatasan pengetahuan dan edukasi kebencanaan, faktor ekonomi yang membuat masyarakat lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan hidup, serta kurangnya dukungan program pemberdayaan yang berkelanjutan dari pemerintah. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara belum optimal dan masih bersifat simbolik. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran, edukasi, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat agar tercipta partisipasi yang lebih aktif dan bermakna dalam upaya pengurangan risiko bencana.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Mitigasi Bencana, Banjir, Aceh Tenggara.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji syukur kepada Allah SWT yang mana dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tenggara”. Shalawat serta salam senantiasa peneliti curahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana dengan perjuangan beliau sehingga kita dapat merasakan berbagai nikmat. Skripsi ini merupakan karya tulis yang diperlukan untuk syarat kelulusan pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari banyak pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof.Dr. Muji Mulia, M.Ag., selaku Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., M.P.A., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Zakki Fuad Khalil,S.IP.,M.Si. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara selaku pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Prof. Dr. Muslim Zainuddin, M.Si.,selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan serta saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerntahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Khusus kedua orang tua, abang, kakak, adik, keluarga, dan sahabat tersayang terima kasih atas doa, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan.

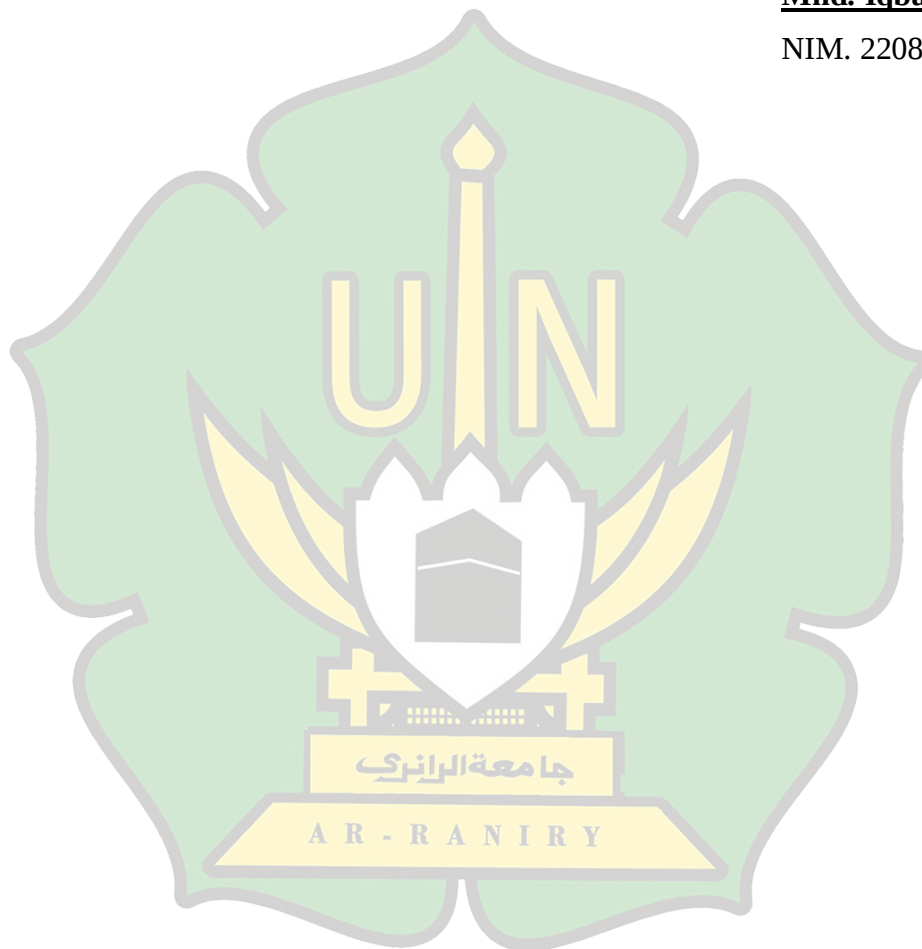
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena

itu, segala masukan dan kritikan sangat peneliti harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat terhadap berbagai pihak.

Banda Aceh, 10 Agustus 2026

Mhd. Iqbal

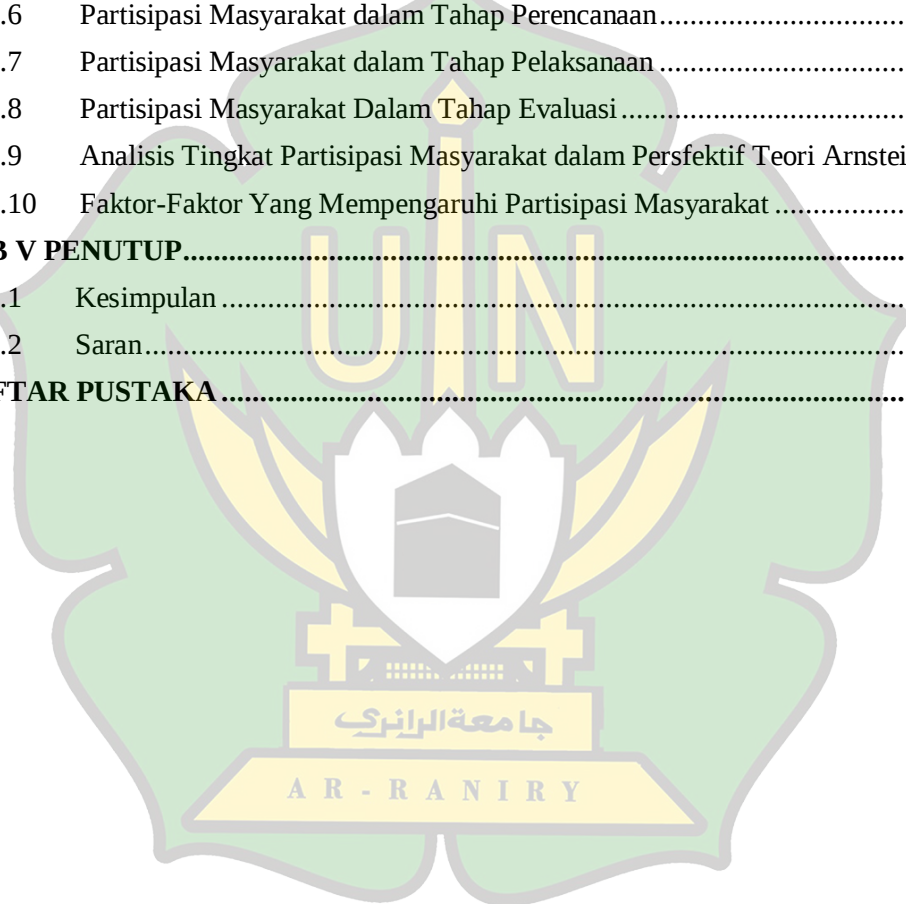
NIM. 220802100



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Idendifikasi Masalah	8
1.3 Rumusan Masalah	9
1.4 Tujuan penelitian.....	9
1.5 Manfaat penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Kerangka Teori	10
2.1.1 Konsep Mitigasi Bencana.....	10
2.1.2 Teori Parsitipasi.....	13
2.1.3 Teori Kebijakan	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Kerangka berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
3.1 Pendekatan Penelitian.....	25
3.2 Fokus penelitian	25
3.3 Lokasi penelitian	26
3.4 Jenis dan sumber data	27
3.5 Informan penelitian	27
3.6 Teknik Pengumpulan data	28
3.7 Teknik analisis data.....	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Gambaran Umum kondisi banjir kabupaten aceh tenggara tahun 2020-2025 .31	
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara	31
4.1.2 Data Kejadian Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020–2025	33

4.1.3	Peta Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara	35
4.1.4	Banjir Besar 27 November 2025.....	37
4.2	Profil badan penanggulangan bencana daerah (BPBD).....	39
4.2.1	Tugas Pokok dan Fungsi BPBD.....	40
4.2.2	Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara	42
4.3	Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.....	45
4.4	Analisis Renstra Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara	47
4.5	Program Mitigasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.....	48
4.6	Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan.....	51
4.7	Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan	53
4.8	Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi	55
4.9	Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Teori Arnstein	58
4.10	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat	63
BAB V PENUTUP.....		67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Sebaran Korban Jiwa Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Provinsi Aceh	6
Tabel 1. 2 Kejadian dan Dampak Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.....	7
Tabel 2. 1 Tabel Literatur Riview	21
Tabel 3. 1 Informan Penelitia	27
Tabel 4. 1 Data Kejadian Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020–2025	33
Tabel 4. 2 Program Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tenggara	50
Tabel 4. 3 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Teori Arnstein	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4 1 Peta Wilayah Kecamatan Rawan Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.....	36
Gambar 4 2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara.....	45
Gambar 4 3 musrembang di dapil II	54
Gambar 4 4 kegiatan Gotong Royong.....	56



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin penelitian.....	74
Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara.....	78
Lampiran 3 Foto Dokumentasi Penelitian	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang sangat rentan terhadap berbagai jenis bencana, terutama banjir akibat kondisi geografis dan klimatis yang unik. Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007, faktor demografis, geografis, dan hidrologis di Indonesia memungkinkan terjadinya bencana yang berdampak pada korban jiwa, berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan kerugian materi serta berdampak pada tekanan psikologis yang serius¹. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa terjadi 1.680 peristiwa banjir di berbagai wilayah Indonesia yang terdampak pada lebih dari 1,3 juta jiwa dan menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp. 2,4 triliun². Sebagai langkah penanggulangan, pemerintah Indonesia telah mengimpelementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mengatur Penanggulangan Bencana, yang memiliki tujuan untuk mencegah, mengurangi, menghindari, dan memulihkan dampak baik sebelum, saat, maupun setelah kejadian³.

Provinsi Aceh khususnya, sering menghadapi bencana alam, dengan banjir salah satu ancaman utama. Penyebab utama bencana banjir di Aceh termasuk curah hujan yang tinggi, penebangan hutan dan penumpukan sampah. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, peringatan dini, rehabilitasi, dan rekontribusi pembangunan⁴. Selain banjir, Aceh juga pernah mengalami bencana longsor dan tsunami.

Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (APBA), bencana banjir yang terjadi pada bulan November 2025 melanda 16 kabupaten

¹ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

² GoodStats, "Banjir Dominasi Bencana Alam Indonesia 2024,"

<https://data.goodstats.id/statistic/banjir-dominasi-bencana-alam-indonesia-2024-DH6IL>, diakses 29 April 2025.

³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

⁴ Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Bencana

atau kota di Propinsi Aceh dan berdampak pada 119.988 jiwa atau sekitar 33.817 kepala keluarga (KK), dengan 20.759 jiwa atau 6.998 KK diantaranya terpaksa mengungsi akibat genangan banjir yang cukup parah. Banjir dipicu oleh curah hujan ekstrem ini juga menyebabkan kerusakan pada berbagai infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, serta mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Besarnya dampak yang ditimbulkan mendorong Pemerintah Aceh menetapkan status tanggap darurat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 guna mempercepat upaya penanganan, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak⁵.

Jika ditelusuri lebih lanjut, tingkat keparahan bencana hidrometeorologi akhir November 2025 tersebut sangat bervariasi antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Berdasarkan data korban jiwa yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Utara mencatat jumlah korban jiwa tertinggi yaitu 246 orang, diikuti Kabupaten Aceh Tamiang 101 orang, Kabupaten Aceh Timur 57 orang, Kabupaten Bireuen 40 orang, Kabupaten Bener Meriah 32 orang, Kabupaten Pidie Jaya 29 orang, dan Kabupaten Aceh Tengah 25 orang. Kabupaten Aceh Tenggara mencatat 14 korban jiwa, menempatkannya pada peringkat kedelapan dari sekitar tiga belas kabupaten/kota di Aceh yang melaporkan korban jiwa akibat bencana tersebut.

Meskipun Kabupaten Aceh Tenggara tidak berada pada peringkat kabupaten dengan dampak terparah secara keseluruhan di tingkat provinsi, tingginya frekuensi kejadian banjir yang berulang di wilayah ini dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari peristiwa tahun 2019, 2024, hingga 2025, menunjukkan pola kerentanan yang bersifat kronis dan berkelanjutan, sehingga tetap relevan untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari sisi bagaimana partisipasi masyarakat terbentuk pada daerah yang berulang kali menghadapi bencana serupa.

⁵ Media Aneuk Nanggroe, "BPBA Rilis Data Resmi: 16 Kabupaten/Kota di Aceh Terendam Banjir, 119.988 Jiwa Terdampak," <https://www.mediananggroe.com/berita-aceh/bpba-rilis-data-resmi-16-kabupaten-kota-di-aceh-terendam-banjir-119-988-jiwa-terdampak/>, diakses 17 Januari 2026

Di Kabupaten Aceh Tenggara, fenomena banjir semakin meningkat akibat curah hujan yang tinggi, kerusakan hutan dan kerusakan tanggul sungai. Dampak dari bencana ini menyebabkan rusaknya infrastruktur, penurunan perekonomian masyarakat, serta munculnya wabah penyakit. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara telah mengeluarkan kebijakan mitigasi bencana dan Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2007 dan Qanun Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penanggulangan bencana banjir⁶.

Secara lebih spesifik, Qanun Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 turut mengatur kedudukan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, termasuk hak masyarakat untuk memperoleh informasi terkait kebijakan penanggulangan bencana, dilibatkan dalam tahap perencanaan, serta berperan dalam pengawasan dan pemberian masukan atas pelaksanaan program penanggulangan bencana banjir. Ketentuan ini menegaskan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana. Namun demikian, sejauh mana ketentuan normatif tersebut benar-benar terwujud dalam praktik pelibatan masyarakat di lapangan masih perlu dikaji lebih lanjut, dan hal inilah yang menjadi salah satu persoalan yang diangkat dalam penelitian ini.

Mitigasi merupakan tindakan untuk meminimalkan dampak dari bencana, baik secara pendekatan fisik seperti pembangunan infrastruktur dengan mengacu pada perundang-undangan dan penelitian yang pernah dilakukan. Mitigasi diterapkan untuk semua jenis bencana, termasuk bencana, non alam, maupun yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia. Tujuan mitigasi adalah untuk mengurangi kerugian dari bencana, termasuk korban jiwa atau kerugian materi⁷. Sesuai peraturan Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 mengenai tindakan pencegahan bencana banjir. Pemerintah pusat melalui BNPB (badan nasional penanggulangan

⁶ Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

⁷ Sularso, Octavianus, dan Suryono, "Mitigasi Risiko Bencana Banjir di Manado," *Jurnal Spasial* 8

bencana) memiliki tanggung jawab, dan bekerjasama pada pemerintahan daerah BPBD (badan penanggulangan bencana daerah) dalam penanganan bencana banjir ditingkat daerah⁸.

Jika melihat hasil riset Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Tenggara mencatat bahwa banjir yang sangat parah melanda 5 (lima) kecamatan. Yaitu Kecamatan Semadam, Kecamatan Lawe Sumur, Kecamatan Babel, Kecamatan Lawe Bulan, serta Kecamatan Bukit Tusam. Menurut data sementara, jumlah warga terdampak banjir bandang mencapai 509 Kepala Keluarga (KK) atau sekitar 1.539 jiwa. Beberapa rumah mengalami kerusakan akibat banjir pada tahun 2019, dengan rincian 2 rumah rusak sedang, 2 rusak ringan, dan 4 rusak berat, sementara 398 lainnya terendam⁹. Dan bahkan justru tambah meningkat Hingga sampai sekarang 2024, terdampak mengakibatkan sebanyak 46 Kute (Gampong/Desa) tersebar di 11 Kecamatan terendam banjir. Sebanyak 3.236 jiwa atau 831 Kepala Keluarga (KK) terdampak¹⁰.

Peristiwa banjir bandang kembali terjadi pada 27 November 2025 dan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi terparah yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Bencana ini berdampak luas pada 16 kecamatan dan 124 desa, dengan jumlah korban terdampak mencapai 4.613 kepala keluarga atau 14.613 jiwa, serta menelan korban jiwa sebanyak 13 orang yang telah ditemukan oleh tim gabungan. Selain menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi yang signifikan, banjir bandang juga menyebabkan kerusakan infrastruktur publik, meliputi 18 unit tempat ibadah, 31 unit sekolah, 9 unit pesantren, dan 1 unit puskesmas. Sektor permukiman masyarakat turut terdampak serius dengan rincian 429 rumah rusak berat, 299 rumah rusak sedang, dan 1.162 rumah rusak ringan. Besarnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Banjir.

⁹ BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, "Aceh Tenggara Diterjang Banjir Bandang, 5 Kecamatan Terendam Air," <https://bpb.d.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/cuaca-ekstrim/aceh-tenggara-diterjang-banjir-bandang-5-kecamatan-terendam-air>, diakses 29 April 2025

¹⁰ Riky Octa Berutu, "3.236 Jiwa Terdampak Banjir Aceh Tenggara," 2024, <https://www.acehonline.co/news/3-236-jiwa-terdampak-banjir-aceh-tenggara/index.html>, diakses 29 April 2025.

risiko banjir di Kabupaten Aceh Tenggara masih sangat tinggi dan menegaskan pentingnya penguatan upaya mitigasi bencana yang tidak hanya berfokus pada aspek struktural, tetapi juga pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana secara berkelanjutan ¹¹.

Tabel 1.1 Sebaran Korban Jiwa Akibat Bencana Banjir dan Longsor di Provinsi Aceh per Kabupaten/Kota (Data per 27 November 2025)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Jiwa (Orang)
1	Aceh Utara	246
2	Aceh Tamiang	101
3	Aceh Timur	57
4	Bireuen	40
5	Bener Meriah	32
6	Pidie Jaya	29
7	Aceh Tengah	25
8	Aceh Tenggara	14
9	Gayo Lues	5
10	Kota Langsa	5
11	Kota Lhokseumawe	5
12	Kota Subulussalam	2
13	Pidie	1
14	Nagan Raya	1
	Jumlah	563

Sumber: Diolah dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), per 27 November 2025

¹¹ AJNN, "Data Update: BPBD Aceh Tenggara, 101 Desa Diterjang Banjir, Korban Terdampak Bertambah," <https://www.ajnn.net/news/data-update-bpbd-aceh-tenggara-101-desa-diterjang-banjir-korban-terdampak-bertambah/index.html>, diakses 19 Januari 2025

Tabel 1.2 Perkembangan Kejadian dan Dampak Bencana Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019–2025

Tahun	Wilayah Terdampak	KK Terdampak	Jiwa Terdampak	Korban Jiwa	Rumah Rusak
2019	5 Kecamatan	509 KK	1.539 Jiwa	-	4 RB, 2 RS, 2 RR, 398 terendam
2024	11 Kecamatan (46 Desa)	831 KK	3.236 Jiwa	-	Belum terinci
2025	16 Kecamatan (124 Desa)	4.613 KK	14.613 Jiwa	13 Orang	429 RB, 299 RS, 1.162 RR

Keterangan: RB = Rusak Berat, RS = Rusak Sedang, RR = Rusak Ringan. Sumber: Diolah dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dan BPBA, data 2019–2025

Data pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dari empat belas kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang melaporkan korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi akhir November 2025, Kabupaten Aceh Tenggara berada pada peringkat kedelapan dengan 14 korban jiwa, jauh di bawah Kabupaten Aceh Utara yang mencatat jumlah korban jiwa tertinggi. Namun, apabila dicermati dari sisi tren waktu sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2, pola yang terlihat justru berbeda: cakupan wilayah, jumlah keluarga terdampak, dan jumlah jiwa terdampak di Kabupaten Aceh Tenggara terus meningkat pada setiap kejadian banjir sejak tahun 2019 hingga 2025. Jumlah kecamatan terdampak bertambah dari 5 kecamatan pada tahun 2019 menjadi 16 kecamatan pada tahun 2025, sementara jumlah jiwa terdampak melonjak lebih dari sembilan kali lipat, dari 1.539 jiwa menjadi 14.613 jiwa dalam kurun waktu enam tahun. Pola peningkatan yang konsisten tersebut memperkuat argumen bahwa persoalan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara bukan sekadar peristiwa insidental, melainkan risiko yang bersifat kronis dan terus membesar dari tahun ke tahun, sehingga menuntut penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan mitigasi bencana.

Salah satu permasalahan utama dalam partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara adalah masih rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana banjir. Sebagian masyarakat cenderung melihat banjir sebagai fenomena alam yang tidak dapat di hindari, sehingga upaya pencegahan dianggap kurang mendesak. Minimnya pengetahuan tentang langkah-langkah mitigasi,

seperti menjaga kelestarian lingkungan, pengelolaan sampah, serta kesiapsiagaan darurat, menyebabkan masyarakat lebih banyak bersikap reaktif setelah bencana terjadi, bukan proaktif dalam mengantisipasinya¹². Pengelolaan banjir yang efektif memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat lokal untuk menghadapi sifat permasalahan yang kompleks dan lintas sektor. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, potensi munculnya masalah sosial baru akibat peristiwa banjir tetap tinggi¹³.

Keterlibatan masyarakat adalah elemen krusial dalam upaya mitigasi bencana, karena hal ini menentukan sejauh mana masyarakat terlibat dalam proses pengurangan risiko bencana. Berdasarkan pendapat Sherry R. Arnstein (1969), partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran dalam suatu kegiatan, tetapi juga menggambarkan seberapa besar masyarakat memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Arnstein mengelompokkan partisipasi menjadi tiga level, yaitu non-participation, tokenism, dan citizen power. Semakin tinggi level partisipasi, semakin besar peran dan kekuasaan masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan publik¹⁴. Dalam konteks mitigasi risiko banjir, partisipasi yang efektif sangat dibutuhkan untuk membangun kesiapsiagaan, meningkatkan kesadaran akan risiko, serta memperkuat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam usaha mengurangi dampak bencana.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti ditemukannya tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir umumnya berada ditingkat pada level tokenism atau masyarakat simbolik, dimana masyarakat hanya dilibatkan sebatas menerima informasi atau konsultasi tanpa memiliki kekuasaan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat

¹² Aisyah Nur Rahma dan Dini Gandini Purbaningrum, "Partisipasi Masyarakat dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3, no. 3 (2024): 88–109.

¹³ Abdur Rahman et al., "A Comprehensive Bibliometric and Content Analysis of Artificial Intelligence in Language Learning: Tracing between the Years 2017 and 2023," *Artificial Intelligence Review* 57, no. 4 (2024): 107.

¹⁴ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Planning Association* 35, no. 4 (1969): 216–224.

juga terkendala oleh faktor ekonomi dan sosial, banyak warga yang lebih fokus pada kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga keterlibatan mereka dalam kegiatan mitigasi, seperti gotong royong pembersihan saluran air atau pertemuan sosialisasi kebencanaan, menjadi terbatas. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya dukungan fasilitas serta program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan, sehingga masyarakat tidak memiliki insentif maupun motivasi yang kuat untuk terlibat aktif dalam upaya pengurangan risiko banjir.

Melihat latar belakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi serta menganalisis praktek pengurangan dampak bencana banjir berbasis partisipasi masyarakat Di Kecamatan Babel, Kecamatan Bukit Tusam dan Kecamatan Lawe Sumur yang merupakan daerah yang paling sering terdampak banjir dan tingkat kerentanan yang tinggi. Studi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merancang program mitigasi yang lebih inklusif dan efektif. Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap aspek mitigasi, diharapkan mampu menurunkan risiko serta dampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Disamping itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi daerah lain yang memiliki karakteristik serupa dalam menghadapi bencana alam khususnya banjir..

1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Banjir berdampak terhadap kerusakan infrastruktur, pasar, dan tempat ibadah.
2. Kurangnya partisipasi atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang diatas, Rumusa masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan mitigasi bencana banjir di Kabaputen Aceh Tenggara?

1.4 Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam kebijakan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.

1.5 Manfaat penelitian

1. Bagi lembaga pemerintah: dapat mengetahui bagaimana pembuatan kebijakan terhadap penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara melalui tingkatan partisipasi masyarakat.
2. Bagi masyarakat: dapat menyadari bagaimana tingkat partisipasi mereka terhadap kebijakan mitigasi bencana di Aceh Tenggara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Konsep Mitigasi Bencana

a. Pengertian mitigasi bencana

Menurut definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian mitigasi bencana ialah sebuah langkah konkret atau upaya untuk mengatasi atau mengurangi dari suatu peristiwa kejadian bencana. Berdasarkan UU No 24 Tahun 2007, mitigasi bencana merupakan kumpulan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, melalui pembangunan fasilitas fisik serta peningkatan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.¹⁵

Mitigasi bencana mencakup berbagai usaha atau aksi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana atau setidaknya meminimalkan akibatnya. Mengacu pada UU No 24 Tahun 2007 tentang lembaga kebencanaan, kegagalan dalam manajemen kebencanaan menjadi elemen penting yang perlu dibenahi melalui beragam tindakan sebelum, ketika dan setelah bencana berlangsung. Tujuan bencana sesuai pasal 4 ialah:

- 1) Melindungi seluruh wilayah dari bahaya bencana,
- 2) Menyesuaikan pedoman yang ada,
- 3) Memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan secara terencana, terkoordinasi, komprehensif, dan terintegrasi
- 4) Menghargai kearifan lokal,
- 5) Menggalang dukungan serta pengorganisasian antara pihak publik dan swasta,
- 6) Mendorong partisipasi, kepedulian dan solidaritas masyarakat,
- 7) Menciptakan keselarasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

b. Ruang lingkup mitigasi bencana

Beberapa ruang lingkup mitigasi bencana, diantaranya:

- 1) Identifikasi dan pengawasan terhadap risiko bencana;
- 2) Pengembangan strategi penanggulangan bencana yang melibatkan partisipasi masyarakat
- 3) Peningkatan kesadaran budaya terhadap bencana;
- 4) Pelaksanaan tindakan fisik, non-fisik, serta tindakan penangan bencana
- 5) Pengidentifikasian dan pengenalan terhadap sumber-sumber risiko bencana
- 6) Pengawasan terhadap penggunaan teknologi canggih; dan Pengawasan dalam pelaksanaan tata ruang serta pengelolaan lingkungan hidup.

c. Keterlibatan pemerintah dalam kebijakan mitigasi

Pemerintah perlu memiliki kapasitas yang memadai untuk mengelola bencana yang terjadi. Kapasitas ini mencakup perencanaan dan persiapan dalam merespon bencana, koordinasi bantuan, kebijakan rekonstruksi, serta penanganan isu populasi. Dengan mengembangkan program manajemen bencana yang efektif, pemerintah dapat melakukan koordinasi yang lebih baik. Sesuai dengan hukum kemanusiaan internasional pemerintah pusat memegang peran utama dalam penanganan kejadian bencana alam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPDB) berperan penting dalam memberikan rasa aman melalui mitigasi bencana, terutama terkait banjir yang menjadi perhatian utama saat musim hujan. Mengingat bencana sering terjadi tanpa peringatan, BPBD fokus pada peningkatan kapasitas masyarakat sebagai langkah untuk memastikan keselamatan. Peningkatan kapasitas ini melibatkan edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko banjir.¹⁶

¹⁶ Danny Permana, "Peran Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Risiko Bencana Alam di Kabupaten Bandung," *Jurnal Ilmu Sosial* 21, no. 2 (2023): 156–65

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanganan Bencana, upaya mitigasi bencana wajib berlandaskan beberapa prinsip mendasar, seperti nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persamaan dihadapan hukum, keseimbangan, keharmonisan, keteraturan, kepastian hukum, kolaborasi, perlindungan lingkungan, serta penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, dalam penanggulangan bencana, penting untuk memperhatikan dasar-dasar operasional, seperti kecepatan dan ketetapan dalam proses, penentuan prioritas, koordinasi dan integrasi, efisiensi serta efektivitas, keterbukaan dan tanggung jawab publik, kemitraan, pemberdayaan masyarakat, serta menjunjung tinggi asas non-diskriminasi dan tidak memaksa ajaran kepercayaan tertentu.¹⁷

d. Jenis-jenis mitigasi bencana

1) Mitigasi Struktural

Upaya untuk menekankan efek bencana melalui pengembangan fasilitas fisik yang didukung oleh teknologi. Contohnya termasuk pembangunan waduk untuk mengurangi risiko banjir, pengembangan perangkat yang mampu mendeteksi gejala vulkanik, serta penggunaan sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi tsunami, serta konstruksi yang dirancang agar kuat dan aman saat terjadi bencana.

2) Mitigasi Nonstruktural

Mitigasi nonstruktural merupakan langkah untuk menurunkan risiko bencana dengan menerapkan regulasi dan kebijakan tertentu. Contohnya antara lain Undang-Undang Penanggulangan Bencana (UU PB), perencanaan pengaturan ruang wilayah kota, serta berbagai kegiatan lainnya yang bertujuan untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

¹⁸ Gramedia, "Mitigasi Bencana," <https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/>, diakses 20 Januari 2024.

2.1.2 Teori Parsitipasi

Partisipasi adalah bentuk peran serta individu maupun kelompok dalam aktivitas pembangunan, baik melalui koordinasi maupun partisipasi dalam kegiatan, dengan memberikan saran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan sumber daya, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan¹⁹. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), partisipasi masyarakat diartikan sebagai keterlibatan warga dalam aktivitas tertentu, terutama dalam hal pembangunan, pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya²⁰

Sedangkan menurut Arnstein partisipasi masyarakat bukan sekedar keterlibatan formal, tetapi soal distribusi kekuasaan (power sharing)²¹. Ia menegaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya diukur dari kehadiran atau keterlibatan fisik dalam suatu kegiatan, melainkan dari sejauh mana masyarakat memiliki kekuasaan untuk memengaruhi kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Dalam artikelnya yang berjudul *A Ladder of Citizen Participation*, Arnstein mengemukakan delapan tingkatan partisipasi masyarakat (eight rungs of participation) yang disusun dalam bentuk tangga partisipasi, yaitu:

a. Manipulation (Manipulasi)

Merupakan tingkat partisipasi terendah, di mana masyarakat hanya dijadikan sebagai alat legitimasi kebijakan tanpa memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi maupun memengaruhi proses pengambilan keputusan.

b. Therapy (Terapi)

Merupakan bentuk partisipasi yang bertujuan untuk mengubah pola pikir atau perilaku masyarakat agar sesuai dengan tujuan pemerintah. Pada tahap ini, masyarakat belum memiliki peran nyata dalam menentukan kebijakan yang akan dilaksanakan.

¹⁹ Andi Nurhalimah, 2018. *Partisipasi Kaum Perempuan dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa*. Vol 6 No 2

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

²¹ Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224

c. Informing (Pemberian Informasi)

Merupakan tahap ketika pemerintah mulai memberikan informasi kepada masyarakat mengenai program atau kebijakan yang akan dijalankan. Namun, komunikasi yang terjadi masih bersifat satu arah sehingga masyarakat belum memiliki ruang untuk memberikan tanggapan secara efektif.

d. Consultation (Konsultasi)

Merupakan tahap ketika masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, maupun masukan melalui forum seperti rapat, survei, atau musyawarah. Komunikasi pada tahap ini mulai bersifat dua arah, namun sebatas mendengar pendapat masyarakat sebagai bahan pertimbangan, tanpa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan itu sendiri sehingga tidak ada jaminan bahwa masukan tersebut akan diakomodasi dalam kebijakan.

e. Placation (Pelibatan Terbatas)

Merupakan bentuk tokenisme yang tingkatnya lebih tinggi dibandingkan consultation, ditandai dengan diberikannya sejumlah kursi atau posisi perwakilan bagi masyarakat dalam badan, tim, atau forum pengambilan keputusan, misalnya dalam tim atau panitia mitigasi bencana di tingkat desa maupun kecamatan. Meskipun demikian, jumlah perwakilan masyarakat pada umumnya kalah suara dibandingkan pejabat pemerintah, sehingga kewenangan untuk memutuskan tetap sepenuhnya berada pada pemegang kekuasaan dan keterlibatan masyarakat lebih bersifat simbolik daripada substantif.

f. Partnership (Kemitraan)

Menunjukkan adanya hubungan kerja sama yang lebih setara antara pemerintah dan masyarakat. Pada tahap ini, kedua pihak berbagi tanggung jawab serta terlibat bersama dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan

g. Delegated Power (Pendelegasian Kekuasaan)

Merupakan tingkat partisipasi di mana sebagian kewenangan pengambilan keputusan diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan dan program yang dijalankan.

h. Citizen Control (Kontrol Warga Negara)

Merupakan tingkat partisipasi tertinggi, di mana masyarakat memiliki kendali penuh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi suatu program. Pada tahap ini masyarakat berperan sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sherry R. Arnstein memperkenalkan delapan tangga partisipasi warga yang secara konseptual dibagi menjadi tiga tingkatan besar, yaitu Non-Participation, Tokenism, dan Citizen Power²². Ketiga tingkatan ini menggambarkan derajat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik, mulai dari partisipasi yang bersifat semu hingga pada tingkat kekuasaan penuh oleh warga. Dalam konteks mitigasi bencana, pemahaman terhadap tiga tingkatan ini penting untuk menilai sejauh mana masyarakat benar-benar memiliki peran substantif dalam proses penanggulangan risiko bencana di daerahnya.

a. Non-Participation (tidak ada partisipasi nyata)

Tingkatan pertama, Non-Participation, menggambarkan kondisi di mana masyarakat tidak memiliki peran nyata dalam proses pengambilan keputusan. Pada tahap ini, masyarakat hanya dijadikan objek dari kebijakan pemerintah tanpa diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi atau menentukan arah kebijakan. Bentuk partisipasi yang muncul lebih bersifat manipulatif (manipulation) atau terapeutik (therapy), di mana masyarakat hanya diundang untuk mendengarkan arahan atau untuk menenangkan situasi sosial, bukan untuk benar-benar berpartisipasi. Dalam konteks kebencanaan, hal ini tampak ketika

²² Arnstein, S. R. (1969). *A Ladder of Citizen Participation*. *Journal of the American Planning Association*, 35(4),

masyarakat hanya menerima sosialisasi satu arah dari pemerintah tanpa adanya dialog timbal balik.

b. Tokenism (partisipasi semu/symbolik)

Tingkatan kedua, Tokenism, mencerminkan bentuk partisipasi simbolik yang tampak seolah masyarakat dilibatkan, namun kekuasaan utama tetap berada pada pemerintah. Dalam tahap ini, masyarakat diberi kesempatan untuk mendapatkan informasi (informing), dimintai pendapat (consultation), atau dilibatkan secara terbatas sebagai penasehat (placation). Walaupun komunikasi antara pemerintah dan masyarakat mulai terbentuk, keputusan akhir tetap berada di tangan otoritas. Pada tahap ini, suara masyarakat sering kali hanya menjadi formalitas untuk memenuhi prinsip partisipatif. Dalam praktik mitigasi banjir, hal ini dapat terlihat ketika masyarakat diundang dalam rapat koordinasi atau survei lapangan, tetapi rekomendasi mereka jarang ditindaklanjuti secara konkret dalam kebijakan.

c. Citizen Power (partisipasi bermakna dengan kekuasaan nyata)

Tingkatan ketiga yaitu Citizen Power, merupakan bentuk partisipasi yang paling tinggi dan ideal. Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kekuasaan nyata dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme partnership, delegated power, maupun citizen control. Dalam tahap partnership, masyarakat dan pemerintah bekerja secara sejajar sebagai mitra yang setara dalam merumuskan kebijakan mitigasi bencana. Pada delegated power, sebagian kewenangan diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan tertentu, seperti pengawasan lingkungan atau sistem peringatan dini. Sedangkan pada citizen control, masyarakat memiliki kendali penuh terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program mitigasi. Tingkat partisipasi ini mencerminkan pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya, di mana warga bukan hanya penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam pembangunan kebencanaan yang berkelanjutan.

Arnstein menegaskan bahwa semakin tinggi posisi pada tangga, semakin besar kekuasaan masyarakat dalam memengaruhi kebijakan dan program. Oleh karena itu, tokenisme tidak boleh disalahartikan sebagai partisipasi sejati, sebab partisipasi yang bermakna hanya tercapai pada level Citizen Power.

Teori partisipasi Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan dan kekuasaan dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan. Untuk mengoperasionalkan teori tersebut dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

a. Perencanaan

Partisipasi pada tahap perencanaan dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah, menyampaikan aspirasi, menentukan kebutuhan, serta memberikan masukan dalam penyusunan program mitigasi bencana.

b. Pelaksanaan

Partisipasi pada tahap pelaksanaan dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program mitigasi, seperti gotong royong, kegiatan kesiapsiagaan, pemeliharaan lingkungan, dan kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya.

c. Evaluasi

Partisipasi pada tahap evaluasi dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam memberikan kritik, saran, pengawasan, serta penilaian terhadap pelaksanaan program sebagai bahan perbaikan kegiatan selanjutnya.

Ketiga tahapan tersebut digunakan untuk mengetahui bentuk dan tingkat keterlibatan masyarakat, sedangkan tingkat kekuasaan masyarakat dalam setiap tahapan dianalisis berdasarkan tangga partisipasi Arnstein, mulai dari Non-Participation, Tokenism, hingga Citizen Power. Dengan demikian, penelitian tidak hanya melihat apakah masyarakat terlibat, tetapi juga sejauh mana keterlibatan tersebut memberikan pengaruh terhadap proses pengambilan keputusan.

2.1.3 Teori Kebijakan

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki cakupan yang luas. Pemerintah tidak hanya menghasilkan kebijakan ketika menetapkan suatu program atau peraturan, tetapi juga ketika memilih untuk tidak melakukan intervensi terhadap suatu permasalahan. Keputusan untuk tidak bertindak tetap dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, politik, dan hukum bagi masyarakat²³.

Sementara itu, James E. Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam rangka menangani suatu masalah atau persoalan²⁴. Berdasarkan pengertian tersebut, kebijakan publik tidak dapat dipandang sebagai keputusan yang berdiri sendiri dan bersifat sesaat. Kebijakan merupakan pola tindakan yang relatif stabil, memiliki tujuan, serta diarahkan untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Dalam perspektif akademik, kebijakan publik juga dapat dipahami sebagai keputusan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memiliki kewenangan publik. Keputusan tersebut memperoleh legitimasi dari kewenangan yang dimiliki pemerintah dan ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kebijakan publik memiliki dimensi otoritatif, karena dibuat oleh institusi yang secara hukum dan politik memiliki kewenangan untuk mengatur kehidupan masyarakat.

²³ Thomas R. Dye, *Understanding Public Policy*, ed. ke-14 (Boston: Pearson, 2013)

²⁴ James E. Anderson, *Public Policymaking: An Introduction*, ed. ke-6 (Boston: Houghton Mifflin, 2006)

a. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

James E. Anderson membedakan kebijakan publik berdasarkan substansi dan cara pelaksanaannya. Berdasarkan klasifikasi tersebut, jenis-jenis kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Kebijakan Substantif

Kebijakan substantif merupakan kebijakan yang berhubungan dengan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini menyangkut isi atau substansi masalah yang hendak diselesaikan. Kebijakan substantif menjawab pertanyaan mengenai tindakan apa yang akan diambil pemerintah, kelompok mana yang menjadi sasaran, manfaat apa yang diberikan, serta beban atau kewajiban apa yang harus ditanggung oleh masyarakat.

2) Kebijakan Prosedural

Kebijakan prosedural merupakan kebijakan yang mengatur mengenai siapa yang berwenang mengambil keputusan dan bagaimana suatu kebijakan dilaksanakan. Dengan kata lain, kebijakan prosedural tidak terutama mengatur isi masalah, tetapi mengatur mekanisme, tata cara, kelembagaan, dan proses pelaksanaan kebijakan.

3) Kebijakan Distributif

Kebijakan distributif adalah kebijakan yang mengalokasikan manfaat, pelayanan, atau sumber daya kepada individu, kelompok, organisasi, atau wilayah tertentu. Kebijakan ini biasanya memberikan manfaat kepada kelompok sasaran tanpa secara langsung memindahkan sumber daya dari kelompok tertentu kepada kelompok lainnya.

4) Kebijakan Regulatif

Kebijakan regulatif merupakan kebijakan yang bertujuan mengatur, membatasi, atau mengendalikan perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kebijakan ini biasanya memuat larangan, kewajiban, standar, atau persyaratan tertentu yang harus dipatuhi.

5) Kebijakan Redistributif

Kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang bertujuan mengalihkan atau mendistribusikan kembali sumber daya, pendapatan, hak, atau kesempatan dari satu kelompok kepada kelompok lainnya. Kebijakan ini biasanya berkaitan dengan upaya mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

6) Kebijakan Material

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan manfaat atau sumber daya nyata kepada masyarakat. Manfaat tersebut dapat berupa bantuan finansial, fasilitas fisik, pelayanan publik, akses terhadap pendidikan, atau perlindungan sosial. Kebijakan material dapat diukur melalui indikator yang bersifat konkret, seperti jumlah penerima manfaat, besaran anggaran, jumlah fasilitas yang dibangun, atau tingkat peningkatan akses pelayanan publik.

7) Kebijakan Simbolik

Kebijakan simbolik merupakan kebijakan yang lebih menekankan pada penyampaian nilai, pengakuan, legitimasi, atau sikap politik pemerintah. Kebijakan semacam ini belum tentu memberikan manfaat material secara langsung, tetapi dapat memiliki makna penting bagi identitas, kepercayaan, dan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya adalah studi yang telah dilakukan oleh peneliti lain dengan tujuan untuk membandingkan hasil penelitian penulis saat ini dengan temuan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Erni Yusnita dalam penelitiannya, Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh Bpbd Kabupaten Aceh Tenggara. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan mitigasi bencana banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara serta tantangan yang dihadapi. Menggunakan metode penelitian kualitatif wawancara, observasi, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa BPBD telah melakukan berbagai upaya mitigasi seperti penerapan Peraturan

Bupati No. 76 Tahun 2007, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara No. 04 Tahun 2019, penyusunan dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan KRB (Kajian Risiko Bencana), pembangunan tanggul sungai, sistem peringatan dini, hingga program sosialisasi dan pendidikan. Namun, penelitian ini juga menemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan dana, lemahnya koordinasi antarintansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana banjir.

Relevansi dengan penelitian ini ialah penelitian Erni Yusnita berfokus kepada kebijakan BPBD dalam mitigasi bencana banjir, sementara penelitian ini akan mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Dengan demikian, penelitian Erni Yusnita akan menjadi dasar penting untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah berjalan, dan penelitian ini akan melengkapinya dengan menyoroti bagaimana masyarakat berperan langsung dalam mendukung mitigasi bencana.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

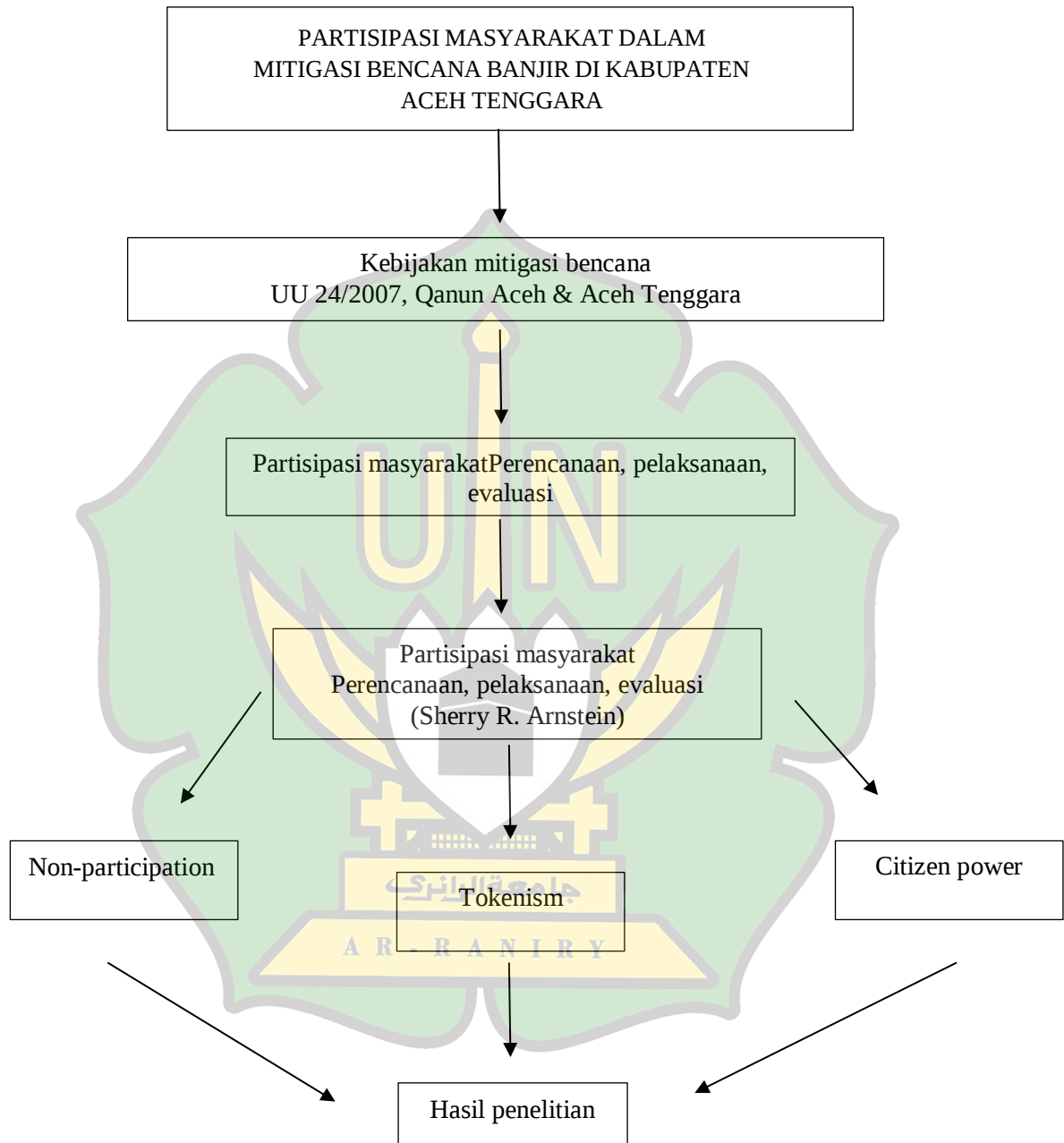
No	Penulis dan tahun terbit	Judul penelitian	Teori/ Kerangka konseptual	Metode penelitian	Teknik analisis data	Hasil penelitian	Gap penelitian
1.	Fazlul Auwal, 2024	Peran BPBD Kabupaten Bireuen Dalam Mitigasi Bencana Banjir	teori mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.	Deskriptif kualitatif	Menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi	BPBD Kabupaten Bireuen belum melaksanakan pembangunan infrastruktur secara efektif dan seragam dalam mitigasi struktural.	Penelitian ini berfokus pada mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bireun, tetapi belum ada yang mendalami mengenai pengaruh kebijakan penataan ruang dan pengaturan terhadap efektivitas mitigasi bencana.

No	Penulis dan tahun terbit	Judul penelitian	Teori/ Kerangka konseptual	Metode penelitian	Teknik analisis data	Hasil penelitian	Gap penelitian
2.	Siti Arbianti, 2024	Kolaborasi Antar Lembaga Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kota Binjai	teori collaborativ e governance Ansell dan Gash	Deskriptif kualitatif	Menganalisis teori collaborative governance Ansell dan Gash yang meliputi dialog tatap muka, membangun kepercayaan antar lembaga, komitmen terhadap proses, saling memahami, dan hasil akhir.	Kolaborasi antar lembaga dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Binjai berjalan dengan cukup baik	Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan menjadi penghambat dalam upaya mitigasi bencana.
3.	Nurul Sahira, 2023	Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara	Teori peran	Pendekatan Deskriptif kualitatif	Menggunakan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi .	Peran BPBD dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara dapat diukur melalui tiga indikator, yaitu tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, dan tahap pasca bencana	Penelitian ini masih memiliki masalah signifikan terkait keterbatasan sumber daya yang dapat mempengaruhi efektivitas penanggulangan bencana. Hal ini mencakup pada anggaran yang terbatas dan pembangunan yang belum memadai.

No	Penulis dan tahun terbit	Judul penelitian	Teori/ Kerangka konseptual	Metode penelitian	Teknik analisis data	Hasil penelitian	Gap penelitian
4	Imelda Tasya, 2023	Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mitigasi bencana Banjir Di Aceh Tamiang	Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi Kebijakan George C. Edwards III, teori kewenangan	Deskriptif kualitatif	Menggunakan penelitian Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research).	Komunikasi yang efektif dalam upaya mengurangi resiko banjir di Aceh Tamiang terjalin dengan baik, termasuk diskusi peroposal mengenai pembangunan tanggul kepada kantor staff kepresidenan, serta melalui program BPBD	Penelitian ini menunjukkan adanya celah dalam kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Tamiang menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak mencukupi.
5	Intan Karnia Sari, 2022	Kebijakan Sosial dalam Penanggulangan Banjir Berbasis Komunitas Di Kecamatan Teunom Kabupaten Aceh Jaya	Teori kebijakan sosial	Deskriptif kualitatif	Menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi	Mekanisme penanggulangan bencana banjir yang dilakukan dengan melalui setting kebijakan, perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan	Penelitian ini mengungkapkan bahwa mekanisme penanggulangan yang ada saat ini masih berfokus pada bantuan sosial, tanpa adanya integrasi.

Adapun yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini yaitu skripsi terdahulu tentang bagaimana kebijakan mitigasi bencana banjir oleh BPBD kabupaten aceh tenggara, bagaimana upaya pemerintah daerah dalam mitigasi bencana banjir di aceh tamiang. Hampir semua penelitian terdahulu hanya mengkaji tentang kebijakan mitigasi bencana banjir di daerah-daerah tertentu. Sedangkan Fokus utama penelitian ini adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana banjir di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dengan menggunakan Teori Parsitipasi Sherry Arntein

2.3 Kerangka berpikir



Ganbar 2.1 kerangka berpikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian adalah suatu proses yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data guna meningkatkan suatu pemahaman tentang suatu topik. Pada studi ini, pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif menitik beratkan pada analisis proses berpikir secara induktif yang berhubungan dengan intraksi dinamis antar fenomena yang diselidiki dan senantiasa menggunakan logika ilmiah secara menyeluruh. Meskipun kualitatif tidak mengesampingkan penggunaan data kuantitatif, pendekatan ini lebih menekankan pada pemikiran mendalam dan formal dari peneliti dalam menjawab tantangan penelitian yang dihadapi.

Menurut pandangan Bogdan & Taylor, metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data secara verbal maupun tulisan dari individu yang perilakunya dapat diamati, dengan fokus pada latar belakang dan individu secara menyeluruh.²⁵

3.2 Fokus penelitian

Fokus penelitian merupakan aspek atau topic spesifik yang menjadi fokus utama dalam sebuah studi atau penelitian. Dalam konteks akademik dan ilmiah, fokus penelitian mengacu pada area atau masalah khusus yang peneliti ingin teliti, analisis, atau eksplorasi secara mendalam. Adapun fokus dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana tingkat partisipasi masyarakat

²⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 79–82.

Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanggulangan bencana banjir, serta menganalisis tantangan Pemerintah dalam melaksanakan upaya mitigasi bencana banjir tersebut.

3.3 Lokasi penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara serta rekam jejak pemberitaan resmi mengenai kejadian banjir dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Babel, Kecamatan Bukit Tusam, dan Kecamatan Lawe Sumur secara konsisten muncul sebagai wilayah terdampak hampir pada setiap peristiwa banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, mulai dari peristiwa banjir Agustus 2023, November 2023, Oktober 2024, Desember 2024, hingga November 2025 – berbeda dengan sebagian kecamatan lain yang hanya terdampak pada sebagian peristiwa saja. Sebagai gambaran, pada peristiwa banjir November 2023 Kecamatan Babel tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yaitu 16 gampong, diikuti Kecamatan Bukit Tusam 7 gampong dan Kecamatan Lawe Sumur 6 gampong, lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain seperti Lawe Bulan (5 gampong) maupun Babussalam (3 gampong).

Pola serupa kembali terulang pada peristiwa banjir pertengahan hingga akhir November 2025, ketika Pusdalops BPBD Kabupaten Aceh Tenggara melaporkan banjir merendam 15 kecamatan, termasuk kembali Kecamatan Babel, Kecamatan Lawe Sumur, dan Kecamatan Bukit Tusam di antaranya. Konsistensi kejadian banjir pada ketiga kecamatan ini dari tahun ke tahun menunjukkan pola kerentanan yang bersifat kronis dan berulang, bukan sekadar kejadian insidental, sehingga Kecamatan Babel, Kecamatan Bukit Tusam, dan Kecamatan Lawe Sumur dipilih sebagai lokasi penelitian ini

3.4 Jenis dan sumber data

Dalam penelitian ini, ada dua tipe pendekatan penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh terutama dari Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai dasar regulasi yang mengatur kebijakan dan mekanisme penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, serta dokumen pendukung lain seperti laporan BPBD dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

b. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian melalui cara pengamatan, wawancara, serta pencatatan langsung ditempat penelitian. Kemudian data yang ditemui dari sumber primer ini akan diolah oleh penulis dan akan membuat sebuah analisis data dokumentasi agar rumusan masalah dan juga tujuan penelitian dari penelitian ini dapat tercapai.

3.5 Informan penelitian

Adapun informan yang akan diperlukan ialah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah	Tupoksi/Jabatan Informan
1	Pihak BPBD Kabupaten Aceh Tenggara	1	Sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Tenggara
2	Kepala Kecamatan	3	1. Camat Bukit Tusam 2. Camat Babel 3. Camat Lawe Sumur
3	Kepala Desa	5	1. Kades Desa Kuning I 2. Kades Desa Kute Lengat Pagan 3. Kades Lawe Hijo 4. Kades Pinding 5. Kades Lawe Sumur
4	Masyarakat	8	Tokoh agama, tokoh pemuda, imeum mukim, dan warga terdampak banjir
Jumlah		17	

Sumber: Data Diolah Peneliti Tahun 2025

3.6 Teknik Pengumpulan data

Dalam studi ini, digunakan sejumlah metode untuk memperoleh data, antara lain:

a. Observasi

Observasi merupakan proses sistematis dalam mencermati fenomena, baik secara fisik maupun psikologis. Milles mengklasifikasikan observasi ke dalam tiga cara. Pertama, observasi bisa dilakukan dengan terlibat langsung atau sebagai pengamat luar. Kedua, pengamatan bisa dilakukan secara terang-terangan (terbuka) atau menyamar (*covert*), meskipun secara etis dianjurkan agar tetap mempertahankan sikap objektif, kecuali dalam situasi tertentu yang memerlukan penyamaran²⁶. Klasifikasi ketiga berkaitan dengan konteks penelitian.

b. Wawancara

Esterberg, sebagaimana dikutip dalam Sugiyono, mengklasifikasikan teknik wawancara ke dalam tiga bentuk, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur.¹ Wawancara terstruktur melibatkan penggunaan pedoman pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian, di mana setiap responden diberi pertanyaan yang sama. Sementara itu, wawancara tidak terstruktur bersifat bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, melainkan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sehingga jawaban dapat berkembang di luar kerangka pertanyaan awal namun tetap berkaitan dengan isu yang diteliti. Wawancara pada dasarnya merupakan bentuk interaksi komunikasi antara peneliti dan responden yang bertujuan untuk memahami sudut pandang (*perspective*) serta makna yang dikonstruksikan oleh informan atas isu-isu yang diteliti²⁷

²⁶ Sanafiah Faisal, dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 377.

²⁷ Esterberg, dikutip dalam Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 320.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi berfungsi untuk mengkaji berbagai sumber dokumen dengan tujuan untuk mengungkapkan peristiwa, objek, dan tindakan yang mampu memperkuat pemahaman peneliti terhadap fenomena yang sedang diteliti. Melalui kajian dokumentasi mungkin adanya ketidaksesuaian atau pertentangan antara hasil wawancara dan observasi dengan informasi yang terdapat dalam dokumen.²⁸

3.7 Teknik analisis data

Proses analisis data merupakan tahapan sistematis yang dilakukan secara terstruktur untuk meneliti, mengelola, dan menginterpretasikan catatan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, dengan maksud untuk meningkatkan pemahaman tentang kasus yang diteliti dan menyampaikan hasil temuan kepada orang lain. Menurut pendapat Bogdan dan Biklen, terdapat dua langkah dalam analisis data, yaitu: analisis saat berada di lokasi penelitian dan (2) analisis setelah meninggalkan lapangan.

Langkah-langkah yang dilakukan selama di lapangan meliputi:

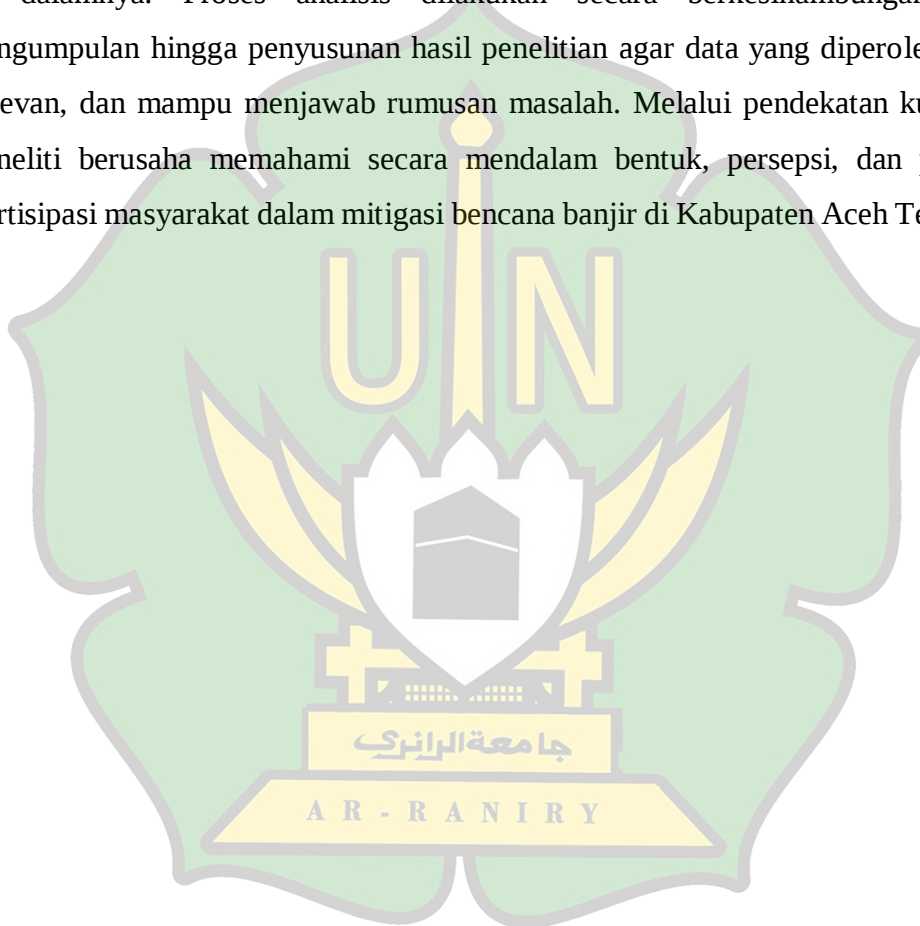
- 1) Menyempitkan ruang lingkup penelitian serta menentukan jenis pendekatannya.
- 2) Terus-menerus mengembangkan pertanyaan secara mendalam.
- 3) Menulis catatan atau komentar peneliti sendiri.
- 4) Mengeksplorasi ide dan tema penelitian dengan subjek sebagai bagian dari analisis penjajagan.
- 5) Menelaah ulang pustaka yang sesuai sepanjang penelitian berlangsung.
- 6) Menggunakan metafora, analogi, dan konsep untuk memahami dan menjelaskan temuan.

²⁸ Ajar Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 22–26.

Sedangkan tindakan atau prosedur yang diambil setelah meninggalkan lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat kategori masalah dan mengatur kodenya.
- 2) Menyusun urutan penelaahannya.

Dengan demikian, analisis data dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan mengelola hasil temuan lapangan, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan hingga penyusunan hasil penelitian agar data yang diperoleh valid, relevan, dan mampu menjawab rumusan masalah. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami secara mendalam bentuk, persepsi, dan perilaku partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum kondisi banjir kabupaten aceh tenggara tahun 2020-2025

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dan terletak di bagian tenggara wilayah provinsi tersebut. Secara geografis, Kabupaten Aceh Tenggara berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di bagian selatan dan timur, sementara di bagian utara dan barat berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Aceh. Posisi geografis tersebut menjadikan Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peranan penting sebagai salah satu wilayah penghubung antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, wilayah ini juga memiliki karakteristik geografis yang cukup beragam, mulai dari daerah perbukitan, pegunungan, hingga dataran rendah yang dilalui oleh beberapa aliran sungai.

Secara topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh Tenggara berada pada kawasan perbukitan dan pegunungan yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Bukit Barisan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan wilayah ini memiliki banyak daerah aliran sungai yang mengalir dari kawasan hulu menuju wilayah hilir. Sungai-sungai tersebut memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan masyarakat, terutama dalam sektor pertanian serta pemenuhan kebutuhan air sehari-hari. Namun demikian, keberadaan sungai-sungai tersebut juga berpotensi menimbulkan bencana banjir apabila terjadi peningkatan debit air secara signifikan akibat curah hujan yang tinggi.²⁹

²⁹ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, "Peta dan Topografi Aceh Tenggara." acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi, diakses 05 April 2026

Secara administratif, Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari beberapa kecamatan yang memiliki kondisi geografis serta tingkat kerentanan bencana yang berbeda-beda. Wilayah ini terbagi ke dalam 16 kecamatan yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik lingkungan yang beragam. Beberapa kecamatan berada di wilayah dataran rendah yang dekat dengan aliran sungai, sementara sebagian lainnya berada di wilayah perbukitan dan pegunungan. Perbedaan kondisi geografis tersebut menyebabkan tingkat risiko bencana, khususnya banjir, tidak merata di setiap wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara.³⁰

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Aceh Tenggara menjadi salah satu wilayah yang cukup sering mengalami bencana banjir. Banjir yang terjadi umumnya disebabkan oleh meluapnya aliran sungai akibat curah hujan yang tinggi dalam waktu yang cukup lama. Selain faktor curah hujan, kondisi lingkungan seperti perubahan tata guna lahan, penebangan hutan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi banjir di wilayah tersebut. Aktivitas pembuangan sampah ke aliran sungai misalnya, dapat menghambat aliran air sehingga menyebabkan air meluap dan menggenangi permukiman masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, terdapat beberapa kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan banjir yang lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Kecamatan Babel, Kecamatan Bukit Tusam, dan Kecamatan Lawe Sumur merupakan tiga wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir sering mengalami dampak banjir dengan tingkat kerusakan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan karena ketiga kecamatan tersebut berada di wilayah yang dekat dengan aliran sungai serta memiliki kondisi topografi yang relatif rendah sehingga lebih mudah

³⁰ BPS Kabupaten Aceh Tenggara, "Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2025." acehtenggarakab.bps.go.id/statistik, diakses 08 April 2026.

terdampak oleh luapan air sungai ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.³¹

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam, tetapi juga oleh faktor lingkungan serta aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi bencana yang melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat, guna mengurangi risiko bencana banjir serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat.

4.1.2 Data Kejadian Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020–2025

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang cukup sering terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi geografis wilayah yang dilalui oleh beberapa aliran sungai serta tingginya curah hujan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan wilayah ini rentan terhadap kejadian banjir. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, kejadian banjir di wilayah ini menunjukkan kecenderungan peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir baik dari segi jumlah kejadian maupun jumlah masyarakat yang terdampak.

Tabel 4.1 Data Kejadian Banjir Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020–2025

Tahun	Jumlah Kejadian	Kecamatan Terdampak	KK Terdampak
2020	22 Kejadian	5 Kecamatan	420 KK
2021	15 Kejadian	7 Kecamatan	560 KK
2022	18 Kejadian	9 Kecamatan	730 KK
2023	22 Kejadian	11 Kecamatan	980 KK
2024	27 Kejadian	13 Kecamatan	1.450 KK
2025	31 Kejadian	16 Kecamatan	4.613 KK

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, Data Kebencanaan Daerah Tahun 2020–2025.

Berdasarkan data pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa kejadian banjir di Kabupaten Aceh Tenggara mengalami fluktuasi namun secara umum menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 22 kejadian banjir yang melanda lima kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai sekitar 420 kepala keluarga. Kejadian banjir pada tahun tersebut

³¹ Erni Yusnita, "Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 45.

sebagian besar dipicu oleh tingginya curah hujan yang menyebabkan beberapa sungai meluap sehingga menggenangi permukiman masyarakat di sekitar daerah aliran sungai³².

Pada tahun 2021 jumlah kejadian banjir mengalami penurunan menjadi 15 kejadian. Meskipun demikian, jumlah kecamatan yang terdampak justru meningkat menjadi tujuh kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai sekitar 560 kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun frekuensi kejadian banjir mengalami penurunan, namun wilayah yang terdampak bencana banjir semakin meluas. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi banjir tidak hanya terjadi pada wilayah tertentu tetapi mulai menyebar ke beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Aceh Tenggara.

Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah kejadian banjir kembali meningkat menjadi 18 kejadian yang melanda sembilan kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai sekitar 730 kepala keluarga. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana banjir di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara masih cukup tinggi, terutama pada daerah yang berada di sekitar aliran sungai serta wilayah dataran rendah yang memiliki tingkat kerentanan lebih besar terhadap genangan air. Pada tahun 2023 jumlah kejadian banjir kembali mengalami peningkatan menjadi 22 kejadian yang melanda sebelas kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai sekitar 980 kepala keluarga. Bertambahnya jumlah kecamatan yang terdampak menunjukkan bahwa risiko banjir di Kabupaten Aceh Tenggara semakin meningkat seiring dengan bertambahnya wilayah yang mengalami genangan air akibat luapan sungai ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Peningkatan kejadian banjir semakin terlihat pada tahun 2024 di mana tercatat sebanyak 27 kejadian banjir yang melanda tiga belas kecamatan dengan jumlah masyarakat terdampak mencapai sekitar 1.450 kepala keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana banjir menjadi salah satu permasalahan lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah karena dampaknya yang semakin luas terhadap kehidupan masyarakat.

Puncaknya terjadi pada tahun 2025 ketika jumlah kejadian banjir mencapai 31 kejadian yang melanda seluruh kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Jumlah

³² BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, "Laporan Tahunan Bencana 2020–2025." bpbd.acehtenggarakab.go.id/publikasi/laporan-tahunan, diakses 08 April 2026

masyarakat terdampak meningkat secara signifikan hingga mencapai sekitar 4.613 kepala keluarga. Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa dampak banjir pada tahun tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sehingga memerlukan upaya penanganan serta mitigasi bencana yang lebih optimal dari pemerintah daerah maupun masyarakat³³.

4.1.3 Peta Wilayah Rawan Banjir di Kabupaten Aceh Tenggara

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana banjir yang cukup tinggi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kondisi geografis wilayah yang dilalui oleh beberapa aliran sungai serta topografi wilayah yang sebagian berada pada dataran rendah. Wilayah yang berada di sekitar daerah aliran sungai umumnya memiliki potensi lebih besar untuk mengalami genangan air ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara serta rekam jejak pemberitaan resmi mengenai kejadian banjir dalam beberapa tahun terakhir, Kecamatan Babel, Kecamatan Bukit Tusam, dan Kecamatan Lawe Sumur secara konsisten muncul sebagai wilayah terdampak hampir pada setiap peristiwa banjir yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, mulai dari peristiwa banjir Agustus 2023, November 2023, Oktober 2024, Desember 2024, hingga November 2025 – berbeda dengan sebagian kecamatan lain yang hanya terdampak pada sebagian peristiwa saja. Sebagai gambaran, pada peristiwa banjir November 2023 Kecamatan Babel tercatat sebagai kecamatan dengan jumlah desa terdampak terbanyak, yaitu 16 gampong, diikuti Kecamatan Bukit Tusam 7 gampong dan Kecamatan Lawe Sumur 6 gampong, lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain seperti Lawe Bulan (5 gampong) maupun Babussalam (3 gampong). Pola serupa kembali terulang pada peristiwa banjir akhir November 2025, ketika hujan berintensitas tinggi kembali merendam sejumlah desa di ketiga kecamatan tersebut, sebagaimana dilaporkan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam rilis berjudul “Akibat Hujan Intensitas Tinggi di Aceh Tenggara, 8 Desa di 3 Kecamatan Terendam Banjir”. Konsistensi kejadian banjir pada ketiga kecamatan ini dari tahun ke tahun menunjukkan pola kerentanan yang bersifat kronis dan berulang, bukan sekadar kejadian insidental, sehingga Kecamatan

³³ Infobencana Aceh Tenggara, "Data Banjir 2025," <https://www.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/pemkab/pemkab-aceh-tenggara-himpun-data-terkini-korban-terdampak-banjir>, diakses 8 April 2026

Bambel, Kecamatan Bukit Tusam, dan Kecamatan Lawe Sumur dipilih sebagai lokasi penelitian ini.

Kerentanan banjir pada ketiga kecamatan tersebut tidak terlepas dari kondisi geografis wilayahnya yang berada di sekitar aliran sungai serta memiliki karakteristik topografi yang relatif rendah. Ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, debit air sungai dapat meningkat secara signifikan sehingga menyebabkan air meluap dan menggenangi permukiman masyarakat yang berada di sekitar bantaran sungai. Selain itu, kondisi drainase yang kurang optimal serta perubahan tata guna lahan juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya potensi banjir di wilayah tersebut³⁴.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai wilayah yang sering terdampak banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, peneliti menyajikan peta wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang menunjukkan lokasi kecamatan yang memiliki tingkat kerentanan banjir tinggi. Pada peta tersebut ditunjukkan posisi Kecamatan Bambel, Kecamatan Bukit Tusam, dan Kecamatan Lawe Sumur sebagai wilayah yang menjadi fokus penelitian dalam kajian ini. Peta tersebut disusun berdasarkan peta administrasi.

wilayah Kabupaten Aceh Tenggara yang kemudian diolah oleh peneliti dengan memberikan penandaan khusus pada wilayah yang sering terdampak banjir.



Gambar 4.1 Peta Kabupaten Aceh tenggara

Sumber: Peta Administrasi Kabupaten Aceh Tenggara, diolah oleh peneliti (2025).

³⁴

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Degradasi Lingkungan dan Banjir*.
<https://www.menlhk.go.id> diakses pada 07 april 2025

Berdasarkan peta tersebut dapat dilihat bahwa ketiga kecamatan yang menjadi lokasi penelitian berada pada wilayah yang memiliki kedekatan dengan beberapa aliran sungai yang melintasi Kabupaten Aceh Tenggara. Kondisi tersebut menjadikan wilayah tersebut lebih rentan terhadap bencana banjir terutama ketika terjadi peningkatan debit air sungai akibat curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, wilayah tersebut memerlukan perhatian khusus dalam upaya mitigasi bencana guna mengurangi risiko serta dampak banjir yang dapat terjadi di masa mendatang.³⁵

4.1.4 Banjir Besar 27 November 2025

Salah satu peristiwa banjir terbesar yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara dalam beberapa tahun terakhir ialah banjir yang terjadi pada tanggal 27 November 2025. Kejadian ini menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap beragam wilayah di Kabupaten Aceh Tenggara serta menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. Banjir tersebut terjadi setelah wilayah Kabupaten Aceh Tenggara mengalami hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari secara berurutan, sehingga mengakibatkan kenaikan debit air pada beberapa sungai yang melintasi wilayah tersebut.

Curah hujan yang tinggi dan berlangsung relatif lama menyebabkan sejumlah sungai di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara meluap, sehingga menggenangi permukiman masyarakat yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Limpasan air tersebut tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga menggenangi berbagai fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, serta lahan pertanian milik masyarakat. Kondisi ini menyebabkan aktivitas masyarakat terganggu dan menimbulkan kerugian yang cukup besar baik dari segi sosial maupun ekonomi.³⁶

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, banjir yang terjadi pada tanggal 27 November 2025 tersebut melanda hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara. Tercatat sebanyak 16 kecamatan dan sekitar 124 desa atau kute mengalami dampak langsung dari peristiwa banjir tersebut. Luasnya wilayah yang terdampak menunjukkan bahwa banjir yang terjadi pada saat itu merupakan salah

³⁵ Erni Yusnita, "Mitigasi Banjir BPBD Aceh Tenggara" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 45.

³⁶ BPBA Aceh, "Akibat Hujan Tinggi: 8 Desa di 3 Kecamatan Aceh Tenggara Terendam," <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/akibat-hujan-intensitas-tinggi-di-aceh-tenggara-8-desa-di-3-kecamatan-terendam-banjir>, diakses 9 April 2026.

satu bencana yang cukup besar yang pernah terjadi di Kabupaten Aceh Tenggara dalam beberapa tahun terakhir

Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa banjir tersebut juga cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Berdasarkan laporan BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, jumlah masyarakat yang terdampak mencapai sekitar 4.613 kepala keluarga atau sekitar 14.613 jiwa. Sebagian masyarakat terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman karena rumah mereka terendam air dan tidak dapat ditempati sementara waktu. Tercatat sekitar 325 kepala keluarga atau sekitar 1.301 jiwa harus mengungsi ke beberapa lokasi pengungsian yang telah disediakan oleh pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya³⁷.

Selain menimbulkan dampak terhadap masyarakat yang terdampak secara langsung, banjir tersebut juga menyebabkan korban jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, tercatat sebanyak 13 orang meninggal dunia akibat peristiwa banjir tersebut. Kejadian ini menjadi salah satu bencana yang cukup memprihatinkan karena tidak hanya menyebabkan kerugian materiil tetapi juga mengakibatkan hilangnya nyawa masyarakat³⁸.

Kerusakan infrastruktur yang ditimbulkan oleh banjir tersebut juga cukup besar. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat kerusakan mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Selain itu, beberapa fasilitas umum seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, serta sarana air bersih juga mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir. Kerusakan infrastruktur tersebut menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat serta menghambat akses transportasi di beberapa wilayah yang terdampak. Tidak hanya itu, sektor ekonomi masyarakat juga turut mengalami dampak yang cukup besar akibat banjir tersebut. Banyak lahan pertanian milik masyarakat yang terendam air sehingga menyebabkan kerusakan tanaman dan gagal panen. Beberapa komoditas pertanian seperti padi, jagung, cabai, serta berbagai jenis sayuran mengalami kerusakan akibat terendam banjir. Selain sektor pertanian, sektor peternakan dan perikanan juga mengalami kerugian karena banyak ternak serta kolam budidaya ikan yang

³⁷ Tribun Aceh, "Data BPBD: Kerusakan Infrastruktur Banjir Bandang Aceh Tenggara 2025." [aceh.tribunnews.com](https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1004452/data-bpbd-kerusakan-infrastruktur-rumah-sekolah-dan-pesantren-dampak-banjir-bandang-aceh-tenggara) (verifikasi dampak luas).- <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1004452/data-bpbd-kerusakan-infrastruktur-rumah-sekolah-dan-pesantren-dampak-banjir-bandang-aceh-tenggara>-Diakses Pada 09 April 2026

³⁸ World Bank, *The Economic Impacts of Natural Disasters*, <https://www.worldbank.org>, diakses 8 April 2026.

terdampak oleh genangan air³⁹.

Peristiwa banjir yang terjadi pada 27 November 2025 menunjukkan bahwa Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tingkat kerentanan yang relatif tinggi terhadap bencana banjir. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penerapan upaya mitigasi bencana yang lebih terencana dan sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun masyarakat. Melalui upaya tersebut, risiko serta potensi dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir diharapkan dapat diminimalkan.

4.2 Profil badan penanggulangan bencana daerah (BPBD)

menunjukkan responden yang berstatus sebagai Karyawan Swasta berjumlah 43 responden dengan persentase 43%, yang berprofesi sebagai Wiraswasta berjumlah 34 responden dengan persentase 34%, yang berstatus sebagai PNS berjumlah 17 responden dengan persentase 17%, dan responden dengan pekerjaan lainnya berjumlah 6 responden dengan persentase 6%.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagai institusi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Pembentukan BPBD didasarkan pada adanya potensi dan risiko bencana yang cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah serta berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Keberadaan lembaga ini diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan berbagai pihak terkait.

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Penanggulangan bencana tersebut meliputi kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, serta tahap pasca bencana yang bertujuan untuk

³⁹ Tribun Aceh, "Banjir Bandang Aceh Tenggara, 1.911 Rumah Rusak, Ini Rinciannya," <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1002777/banjir-bandang-aceh-tenggara-1911-rumah-rusak-ini-rinciannya>, 17 Desember 2025, diakses 6 April 2026.

mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana.⁴⁰ Di Kabupaten Aceh Tenggara, pembentukan BPBD diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Qanun tersebut menjelaskan bahwa BPBD merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Pembentukan lembaga ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penanganan bencana serta memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana.⁴¹

Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga mengacu pada Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural pada BPBD. Peraturan tersebut mengatur secara lebih rinci mengenai tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing unit organisasi yang terdapat dalam BPBD Kabupaten Aceh Tenggara sehingga pelaksanaan penanggulangan bencana dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif.

Keberadaan BPBD sebagai lembaga yang memiliki tugas khusus dalam penanggulangan bencana diharapkan mampu meningkatkan pelaksanaan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terencana dan terkoordinasi. Hal tersebut menjadi penting mengingat Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tingkat potensi bencana yang cukup tinggi, sehingga diperlukan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan terintegrasi untuk mengurangi risiko serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi BPBD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. BPBD dibentuk sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, baik pada tahap sebelum bencana terjadi, saat

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

⁴¹ Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

bencana berlangsung, maupun setelah bencana terjadi. Keberadaan BPBD diharapkan mampu meningkatkan kesiapsiagaan serta kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi di wilayah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 76 Tahun 2007 tentang rincian tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi kegiatan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, serta pasca bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah, lembaga terkait, serta masyarakat guna mengurangi risiko serta dampak yang ditimbulkan oleh bencana.⁴²

a. Tugas pokok BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Tugas pokok BPBD Kabupaten Aceh Tenggara memiliki tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi tiga (3) tahapan utama, yaitu:

1. Pra bencana

BPBD memiliki tugas untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Kegiatan yang dilakukan antara lain perencanaan penanggulangan bencana, pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan bencana. Selain itu, BPBD juga melakukan pengkajian terhadap potensi risiko bencana serta penyusunan standar teknis dalam penanggulangan bencana di daerah.

2. Tahap tanggap darurat

BPBD bertugas melakukan berbagai tindakan yang bertujuan untuk menangani dampak bencana secara cepat dan tepat. Kegiatan tersebut meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta pengelolaan pengungsi. Selain itu, BPBD juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam rangka mempercepat proses penanganan darurat bencana di wilayah yang terdampak.

⁴²

Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 76 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Pasca bencana

BPBD memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna memulihkan kondisi masyarakat serta memperbaiki berbagai sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut meliputi perbaikan infrastruktur, pemulihan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta pembangunan kembali fasilitas umum yang mengalami kerusakan akibat bencana. Dengan demikian, proses pemulihan pasca bencana diharapkan dapat berjalan secara efektif sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitasnya secara normal.⁴³

Selain melaksanakan tugas-tugas tersebut, BPBD juga memiliki beberapa fungsi utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Fungsi tersebut meliputi fungsi pengkoordinasian, pengkomandoan, serta pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Melalui fungsi pengkoordinasian, BPBD berperan dalam mengoordinasikan berbagai kegiatan penanggulangan bencana dengan instansi pemerintah, lembaga terkait, serta organisasi masyarakat. Sementara itu, fungsi pengkomandoan dilakukan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, serta berbagai langkah yang diperlukan dalam penanganan darurat bencana. Adapun fungsi pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan operasional penanggulangan bencana yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai pihak terkait.⁴⁴

4.2.2 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara didukung oleh struktur organisasi yang dirancang untuk menunjang pelaksanaan penanggulangan bencana secara efektif dan terkoordinasi. Struktur tersebut mengatur pembagian tugas dan tanggung jawab pada setiap bidang secara jelas, sehingga pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dapat berjalan sesuai dengan fungsi masing-masing. Selain itu, struktur organisasi BPBD juga berperan dalam memperkuat koordinasi antarunit kerja dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

⁴³ Erni Yusnita, "Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024).

⁴⁴ BNPB, "Peraturan Kepala BNPB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana," bnpb.go.id/peraturan.

Secara umum, struktur organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara terdiri atas unsur pengarah dan unsur pelaksana. Unsur pengarah berperan dalam memberikan arahan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sementara itu, unsur pelaksana bertugas menjalankan kegiatan operasional penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.

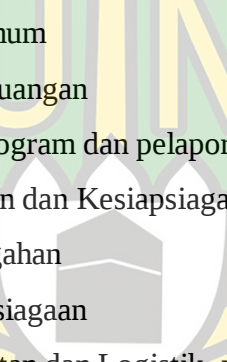
Pada unsur pelaksana, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh kegiatan penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugas tersebut, Kepala Pelaksana didukung oleh sekretariat yang memiliki fungsi dalam pengelolaan administrasi, perencanaan, serta koordinasi pelaksanaan kegiatan internal organisasi.

Selain sekretariat, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara memiliki beberapa bidang yang menjalankan fungsi khusus dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berperan dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana serta meningkatkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Selanjutnya, Bidang Kedaruratan dan Logistik bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pada kondisi darurat, termasuk pengelolaan dan pendistribusian logistik saat terjadi bencana. Sementara itu, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas dalam mendukung proses pemulihan serta perbaikan kondisi masyarakat dan wilayah yang terdampak setelah terjadinya bencana. Selain itu, terdapat pula Bidang Pemadam Kebakaran yang memiliki peran dalam penanganan kebakaran serta kegiatan penyelamatan lainnya.⁴⁵

Selain bidang-bidang tersebut, dalam struktur organisasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga terdapat kelompok jabatan fungsional yang berperan dalam mendukung pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kelompok jabatan fungsional ini terdiri dari tenaga profesional yang memiliki kompetensi tertentu dalam bidang kebencanaan sehingga dapat membantu pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara lebih efektif.

⁴⁵ Erni Yusnita, "Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024), hlm. 44.

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, Struktur Organisasi BPBD Tahun 2024



1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian umum
 - b. Sub bagian keuangan
 - c. Sub bagian program dan pelaporan
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, yang terdiri dari:
 - a. Seksi pencegahan
 - b. Seksi kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, yang terdiri dari:
 - a. Seksi kedaruratan
 - b. Seksi logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang terdiri dari:
 - a. Seksi rehabilitasi
 - b. Seksi rekonstruksi
6. Bidang Pemadam Kebakaran, yang terdiri dari:
 - a. Seksi sarana dan prasarana
 - b. Seksi penanggulangan kebakaran
7. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan adanya struktur organisasi tersebut, diharapkan pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Aceh Tenggara dapat berjalan secara terkoordinasi dan efektif. Pembagian tugas yang jelas antar unit kerja dalam BPBD memungkinkan setiap kegiatan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara lebih terarah, mulai dari tahap pencegahan hingga tahap pemulihan pasca bencana. Hal ini sangat penting mengingat Kabupaten Aceh Tenggara merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi sehingga memerlukan sistem penanggulangan bencana yang terorganisir dengan baik.

4.3 Kebijakan Pemerintah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui BPBD telah melakukan berbagai kebijakan dan program dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir. Kebijakan tersebut tidak hanya berupa pembangunan fisik, tetapi juga mencakup kegiatan nonstruktural yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana.

Beberapa kebijakan dan program yang dilakukan pemerintah antara lain sosialisasi dan edukasi kebencanaan, pelatihan dan simulasi kesiapsiagaan, penyebaran informasi dan peringatan dini, pelibatan masyarakat dalam Musrenbang, pemetaan risiko bencana, serta kegiatan gotong royong dan pemeliharaan lingkungan. Dalam struktur BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan juga memiliki tugas dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

Selain itu, pemerintah daerah memiliki dasar kebijakan melalui Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah. Qanun tersebut menjadi landasan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, termasuk upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana serta perlindungan masyarakat.

Bentuk kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dapat dilihat pada beberapa kegiatan berikut:

1. Sosialisasi dan edukasi kebencanaan

BPBD melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai potensi bencana, kesiapsiagaan, tindakan penyelamatan, dan upaya pengurangan risiko bencana.

Kegiatan ini merupakan bentuk awal pelibatan masyarakat karena memberikan pengetahuan yang diperlukan agar masyarakat mampu mengambil tindakan ketika terjadi bencana. Dalam penelitian ini, sosialisasi juga ditemukan sebagai salah satu bentuk keterlibatan masyarakat yang telah dilakukan pemerintah.⁴⁶

2. Sistem peringatan dini dan penyebaran informasi

Pemerintah juga meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui penyebaran informasi mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana. BPBD Aceh Tenggara pernah menggunakan berbagai media komunikasi, termasuk media sosial, website, radio, serta grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi peringatan dini kepada masyarakat.

3. Pelibatan masyarakat dalam tahapan perencanaan

Pemerintah melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang bersifat langsung, seperti gotong royong, pembersihan lingkungan, pengerukan material sungai, dan kegiatan kesiapsiagaan. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk berperan langsung dalam mengurangi risiko banjir di lingkungan tempat tinggalnya.

4. Penyediaan anggaran dan program penanggulangan bencana

Kebijakan pemerintah juga diwujudkan melalui pengalokasian anggaran untuk program penanggulangan bencana. Dalam APBK Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023, misalnya, terdapat Program Penanggulangan Bencana yang mencakup pelayanan informasi rawan bencana dan penyusunan kajian risiko bencana. Terdapat pula anggaran untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.⁴⁷

⁴⁶ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara (Kutacane: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, 2019), diakses 11 Agustus 2026, <https://jdih.acehtenggarakab.go.id/dih/detail/ad9dab50-bc7e-4d97-9069-59550f1b82d5>.

⁴⁷ Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2022 tentang

Dengan demikian, kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah dilakukan melalui pendekatan informasi, edukasi, komunikasi, pelibatan dalam perencanaan, kegiatan bersama masyarakat, serta penyediaan dukungan program dan anggaran. Namun, keberadaan kebijakan tersebut belum secara otomatis menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki kekuasaan yang besar dalam pengambilan keputusan.

4.4 Analisis Renstra Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara

Salah satu instrumen penting dalam melihat arah kebijakan pemerintah adalah Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2023–2026. Renstra merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, program, kegiatan, dan pendanaan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara menetapkan Renstra OPD Tahun 2023–2026 melalui Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 9 Tahun 2022. Dalam konteks penanggulangan bencana, Renstra penting karena menjadi dasar perencanaan program pemerintah dalam mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketahanan masyarakat. Dokumen tersebut juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai salah satu sumber dukungan dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, arah kebijakan tersebut telah diwujudkan melalui program BPBD berupa sosialisasi, penyampaian informasi kebencanaan, pelibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi, serta forum perencanaan di tingkat desa dan kecamatan. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara arah perencanaan pemerintah dengan pelaksanaan program di lapangan.⁴⁸ Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat masih belum sepenuhnya sampai pada tahap pengambilan keputusan. Masyarakat lebih banyak diberikan kesempatan untuk menerima informasi, menyampaikan usulan, dan mengikuti kegiatan yang telah dirancang pemerintah. Dalam tahap perencanaan, misalnya, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi melalui Musrenbang, tetapi keputusan akhir dan penetapan prioritas program masih lebih banyak berada pada pemerintah daerah dan BPBD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023–2026 (Kutacane: Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, 2022), diakses 11 Agustus 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/260753/perbup-kab-aceh-tenggara-no-9-tahun-2022>.

⁴⁸ Erni Yusnita, *Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara* (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024).

Oleh karena itu, Renstra dapat dinilai telah memberikan arah kebijakan yang mendukung peningkatan partisipasi masyarakat, tetapi implementasinya masih perlu diperkuat agar partisipasi tidak berhenti pada pemberian informasi dan konsultasi. Pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut menentukan prioritas program, mengawasi pelaksanaan, serta memberikan penilaian terhadap hasil program mitigasi.

4.5 Program Mitigasi BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, diketahui bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan sejumlah program mitigasi bencana banjir dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai program tersebut diarahkan untuk mengurangi risiko dan meminimalkan dampak banjir yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Pelaksanaan upaya mitigasi dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat sebagai bagian dari upaya bersama dalam menghadapi risiko bencana.

Salah satu program mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara adalah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana banjir. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat, pelatihan kebencanaan, serta kegiatan simulasi penanggulangan bencana. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diharapkan dapat memahami langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi bencana banjir.⁴⁹

Selain kegiatan sosialisasi, BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga melakukan berbagai upaya mitigasi yang berkaitan dengan pengurangan risiko bencana di lingkungan masyarakat. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pembersihan saluran air, normalisasi sungai, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya memperbaiki sistem drainase di wilayah yang rawan banjir. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengurangi potensi terjadinya genangan air yang dapat menyebabkan banjir di permukiman masyarakat.⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Tenggara:

“Dalam hal perencanaan masyarakat tidak dilibatkan, dikarenakan melibatkan

⁴⁹ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, "Program Sosialisasi dan Edukasi Kesiapsiagaan Bencana Banjir," 2024, <https://www.bpbd.acehtenggarakab.go.id>.

⁵⁰ Muhammad Rifqi, "Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Indonesia."

*masyarakat akan mempersulit tindakan mitigasi terlalu banyak perintah-perintah yang dilontarkan. Pihak pemerintah sudah mengetahui dimana letak rawan-rawan yang akan terjadi bencana banjir melalui tim-tim survey dan penelitian. Masyarakat biasanya dilibatkan dalam kegiatan gotong royong untuk membersihkan saluran air serta lingkungan sekitar agar tidak terjadi penyumbatan aliran air ketika musim hujan tiba”.*⁵¹

Dalam wawancara tersebut, Sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Tenggara juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat melalui berbagai program mitigasi bencana. Hal ini dilakukan karena partisipasi masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penanggulangan bencana, terutama dalam kegiatan pencegahan serta pengurangan risiko bencana banjir yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara

Tabel 4 2 Program Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Tenggara

No	Program/Kegiatan	Dasar Hukum	Instansi Pelaksana	Tujuan	Sasaran
1	Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; Perka BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	BPBD Aceh Tenggara, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa	Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi banjir melalui perencanaan, organisasi, dan kesiapsiagaan desa	Desa rawan banjir di sepanjang DAS Alas dan wilayah yang sering terdampak banjir
2	Sosialisasi dan Edukasi Pengurangan Risiko Bencana	UU No. 24 Tahun 2007; Permendagri No. 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub-Urusan Bencana	BPBD Aceh Tenggara	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyebab, dampak, dan langkah mitigasi banjir	Seluruh desa prioritas rawan banjir
3	Pemetaan Risiko dan Penyusunan Jalur Evakuasi	UU No. 24 Tahun 2007; Peraturan BNPB tentang Kajian Risiko Bencana	BPBD Aceh Tenggara, Pemerintah Desa	Mengidentifikasi wilayah rawan banjir dan jalur penyelamatan warga	Desa dengan riwayat genangan dan banjir bandang
4	Sistem Peringatan Dini (Early Warning System)	UU No. 24 Tahun 2007; RPJMN dan Kebijakan BNPB tentang Kesiapsiagaan Bencana	BPBD Aceh Tenggara, BMKG, Pemerintah Desa	Memberikan informasi cepat terkait potensi hujan ekstrem dan banjir	Desa di bantaran sungai dan daerah dataran rendah

⁵¹ Wawancara dengan Zulsapri Desky, 24 November 2025.

No	Program/Kegiatan	Dasar Hukum	Instansi Pelaksana	Tujuan	Sasaran
5	Pelatihan dan Simulasi Evakuasi Banjir	UU No. 24 Tahun 2007	BPBD Aceh Tenggara, TNI, Polri, Relawan	Melatih masyarakat agar siap melakukan evakuasi secara cepat dan aman	Aparatur desa, relawan, dan masyarakat desa rawan banjir
6	Pembentukan dan Penguatan Relawan Siaga Bencana Desa	UU No. 24 Tahun 2007	BPBD Aceh Tenggara dan Pemerintah Desa	Menyediakan sumber daya manusia lokal untuk penanganan awal bencana	Desa rawan banjir dan longsor
7	Gotong Royong Pembersihan Drainase dan Sungai	Permendesa PDTT tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa	Pemerintah Desa, Kecamatan, Masyarakat	Mengurangi penyumbatan aliran air yang memicu banjir	Seluruh desa terutama yang memiliki drainase buruk
8	Normalisasi Sungai dan Saluran Air	UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	Dinas PUPR, BPBD, Pemerintah Desa	Meningkatkan kapasitas aliran sungai dan mengurangi luapan air	Desa yang berada di bantaran sungai
9	Penhijauan dan Konservasi Daerah Tangkapan Air	UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup, BPBD, Pemerintah Desa	Mengurangi limpasan permukaan dan erosi yang memicu banjir	Desa hulu DAS dan daerah lereng
10	Pembangunan	UU No. 23 Tahun	Dinas PUPR,	Mengurangi	Desa rawan

Sumber: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Website resmi BPBD Aceh Tenggara untuk informasi mitigasi, peringatan dini, dan penanggulangan bencana.⁵²

Dengan adanya berbagai program mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, diharapkan masyarakat dapat lebih siap dalam menghadapi potensi bencana banjir yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Selain itu, program mitigasi tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan serta berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di wilayah tempat tinggal mereka.⁵³

⁵² BPBD Kabupaten Aceh Tenggara, website resmi BPBD Aceh Tenggara untuk informasi mitigasi, peringatan dini, dan penanggulangan bencana, https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/93466/List%20of%20Tables_180903130.pdf.

⁵³ Dwi Aprillia Hapsari, "Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob" (Skripsi, UIN Walisongo, 2019), hlm. 56.

4.6 Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keterlibatan dalam Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), pemetaan risiko bencana, serta forum pengurangan risiko bencana di tingkat desa. Melalui forum tersebut, masyarakat menyampaikan informasi mengenai lokasi rawan banjir, kebutuhan pembangunan infrastruktur pengendali banjir, jalur evakuasi, dan lokasi pengungsian. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tersebut penting karena masyarakat memiliki pengetahuan lokal mengenai sejarah banjir, kondisi lingkungan, akses evakuasi, serta kebutuhan kelompok rentan di wilayahnya.

Namun, berdasarkan hasil penelitian lapangan, keterlibatan masyarakat masih terbatas pada pemberian usulan dan penyampaian masukan. Masyarakat belum memiliki kewenangan yang memadai untuk menentukan keputusan akhir, menetapkan program prioritas, atau memengaruhi alokasi anggaran mitigasi. Proses pengambilan keputusan dan penetapan program masih lebih banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPBD sebagai lembaga yang memiliki kewenangan formal dalam penanggulangan bencana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan berada pada tingkat konsultasi (consultation) dalam tangga partisipasi Arnstein. Pada tingkat ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, tetapi belum memperoleh jaminan bahwa pendapat tersebut akan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.⁵⁴ Hal ini disebabkan karena proses perencanaan kebijakan mitigasi masih didominasi oleh pemerintah daerah melalui BPBD tanpa melibatkan masyarakat secara langsung. Hasil wawancara dengan sekretaris BPBD Aceh Tenggara mengungkapkan bahwa:

“Dalam hal perencanaan masyarakat dilibatkan dalam hal seperti kegiatan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana, mengikuti musrembang di kecamatan dan lain-lain. Namun tidak sepenuhnya dilibatkan, dikarenakan melibatkan masyarakat akan mempersulit tindakan mitigasi. Pihak pemerintah sudah mengetahui daerah rawan melalui tim survei dan penelitian.”⁵⁵

⁵⁴ Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–224.

⁵⁵ Wawancara dengan Zulsapri Desky, 24 November 2025.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan masih bersifat **Top-Down**, di mana pemerintah menjadi aktor utama Dalam menentukan kebijakan. Namun demikian dari sisi masyarakat diperoleh informasi yang berbeda.⁵⁶ Masyarakat menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan lokal mengenai wilayah rawan banjir dan pernah memberikan masukan kepada pihak terkait, ucap Hadianito berikut:

*“Pendapat masyarakat pernah diminta, karena yang memahami daerah rawan banjir adalah masyarakat setempat.”*⁵⁷

Dan juga pernyataan dari masyarakat di Kecamatan Babel, Raksanjani berikut:

*“Kami juga sering menyampaikan kepada pemerintah mengenai apa yang harus dilakukan supaya aliran air ataupun debit air yang besar bisa di atasi. Namun mau gimana lagi daerah sini sampai sekarang apabila hujan selalu tergenang air”.*⁵⁸

Dan juga pernyataan dari kepala Desa Kuning I terkait tahap perencanaan:

*“Kegiatan seperti sosialisasi, musrembang di kecamatan dan lain-lain sebagainya pernah saya ikuti serta ada juga beberapa perangkat desa yang mengikuti kegiatan yang seperti itu. Megenai program mitigasi, belum ada teradminitrasi di APBDES kita”.*⁵⁹

Perbedaan perspektif ini menunjukkan bahwa secara potensial masyarakat memiliki kapasitas untuk dilibatkan, namun belum diakomodasi secara optimal dalam perencanaan kebijakan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan masih terbatas dan belum mencerminkan keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan.

⁵⁶ Agustina et al., "Pendampingan Mitigasi Gempa Berbasis Pengetahuan Lokal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 12.

⁵⁷ Wawancara dengan Hadianito, 25 November 2025.

⁵⁸ Wawancara dengan Raksanjani, 25 November 2025.

⁵⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Kuning I, 24 November 2025.

Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan biasanya terjadi secara tidak langsung melalui penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa atau pemerintah kecamatan. Informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut kemudian menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan serta program mitigasi bencana yang akan dilaksanakan. Meskipun demikian, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan masih relatif terbatas.



Gambar 4.3 musrenbang di dapil II

Sumber: Sosial Media Diskominfo Aceh Tenggara, Kegiatan Musrenbang Dapil II.

Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan program mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena sebagian besar program mitigasi bencana masih dirancang oleh pemerintah daerah tanpa melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan agar program mitigasi bencana yang dilaksanakan dapat lebih efektif dalam mengurangi risiko bencana banjir di wilayah tersebut.

4.7 Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Pelaksanaan

Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan ialah salah satu unsur penting dalam upaya mitigasi bencana. Keterlibatan masyarakat pada tahap ini sangat dibutuhkan karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak dari bencana yang terjadi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara, telah melaksanakan berbagai program mitigasi, antara lain pengerokan material sungai dan penimbunan daerah rawan banjir yang telah dilaksanakan sejak tahun 2023 hingga 2025 melalui dana siap pakai (DSP). Selain itu, kegiatan

sosialisasi juga dilakukan secara rutin setiap tahun di seluruh kecamatan.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Tenggara:

*“Masyarakat di beberapa wilayah yang rawan banjir telah terlibat dalam berbagai kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Keterlibatan masyarakat tersebut biasanya dilakukan dalam bentuk kegiatan gotong royong membersihkan saluran air, memperbaiki lingkungan sekitar, serta membantu kegiatan penanganan bencana ketika terjadi banjir. Selain itu masyarakat juga ter;ibat dalam kegiatan sosialisasi dan poelatihan kebencanaan yang dibuat oleh pihak BPBD”.*⁶¹

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Riduansyah informan kepala camat di Kecamatan Babel:

*“Kegiatan gotong royong sering dilakukan karena diberitahukan oleh kepala desa. kami biasanya secara sukarela terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan upaya pengurangan risiko bencana. Masyarakat bersama-sama melakukan kegiatan pembersihan parit dan saluran air terutama ketika memasuki musim hujan agar tidak terjadi penyumbatan”.*⁶²

Serta pernyataan dari masyarakat di Kecamatan Lawe Sumur, Astuti:

*“Kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan didaerah kami ini ialah seperti gotong royomg di hari minggu, bersih-bersih selokan air yang digerakkan oleh kepala desa disini, pengadaan tong sampah disetiap rumahnya”.*⁶³

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pelaksanaan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, masyarakat berperan aktif dalam berbagai kegiatan, seperti gotong royong membersihkan drainase dan aliran sungai, membantu proses

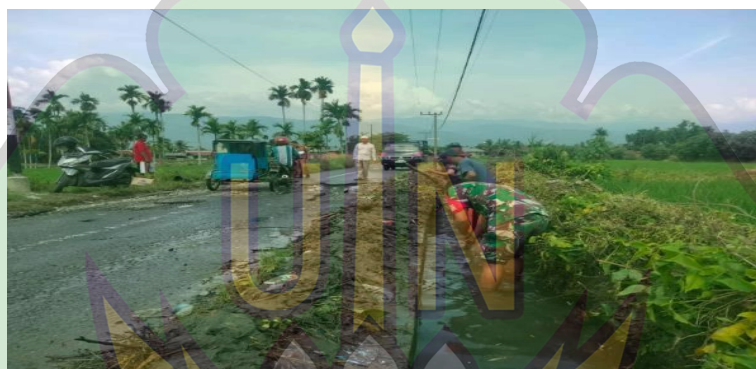
⁶⁰ Erni Yusnita, "Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara" (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2024).

⁶¹ Wawancara dengan Zulsapri Desky, 24 November 2025.

⁶² Wawancara dengan Riduansyah, 24 November 2025.

⁶³ Wawancara dengan Astuti, 24 November 2025.

normalisasi sungai, melakukan penanaman pohon di kawasan bantaran sungai, serta berpartisipasi dalam evakuasi dan distribusi bantuan ketika banjir terjadi. Pelaksanaan upaya mitigasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi antara BPBD, pemerintah desa, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Meskipun demikian, peran masyarakat masih lebih banyak sebagai pelaksana program yang telah dirancang oleh pemerintah. Oleh karena itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi dapat dikategorikan pada tingkat Placation (Tokenism) menurut Tangga Partisipasi Arnstein, yaitu masyarakat telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi belum memiliki kewenangan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan.



Gambar 4.4 kegiatan Gotong Royong

Sumber: *Diskominfo Aceh Tenggara, Kegiatan Gotong Royong Pembersihan Irigasi.*

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana di Kabupaten Aceh Tenggara sudah mulai terlihat melalui berbagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana agar risiko banjir di wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikurangi secara lebih efektif.⁶⁴

4.8 Partisipasi Masyarakat Dalam Tahap Evaluasi

Dalam tahap evaluasi, masyarakat pada dasarnya telah diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun saran terhadap kegiatan mitigasi bencana banjir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Keberadaan ruang ini menunjukkan bahwa secara formal pemerintah telah membuka peluang

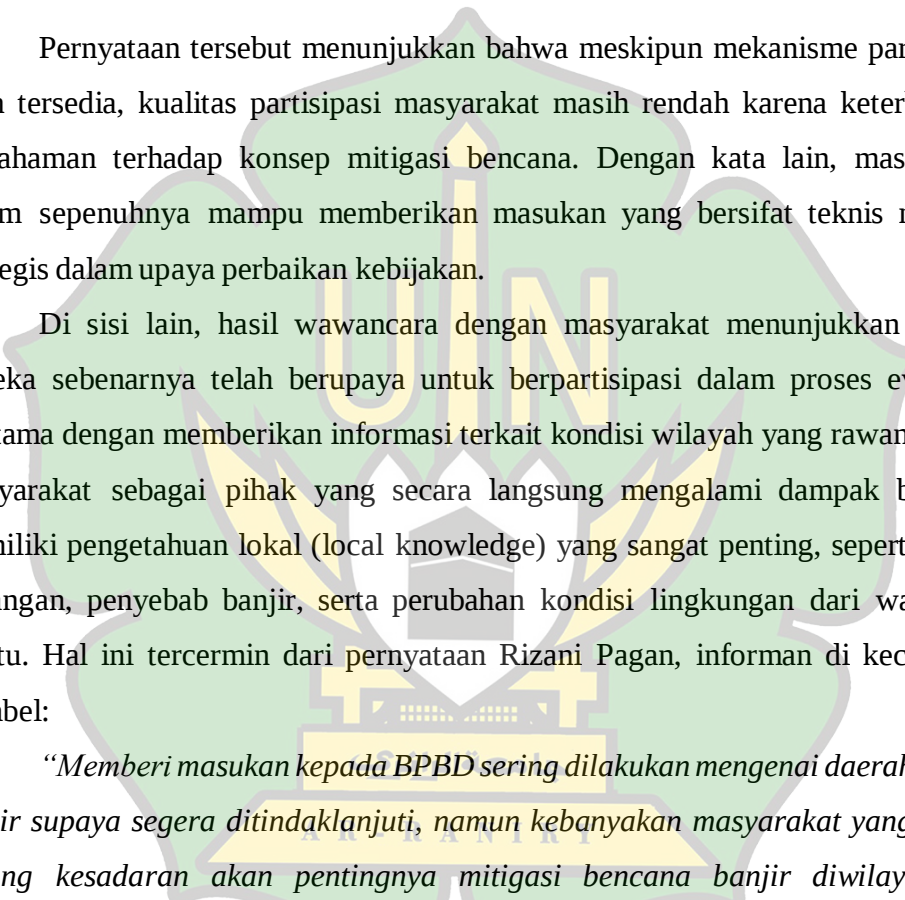
⁶⁴ Tim Peneliti, "Mitigasi Banjir Kecamatan Leuser," Laporan Penelitian (2018), hlm. 23, <https://www.academia.edu/35875251>, diakses 8 April 2026. Lampung, 2023, hlm. 78.

terjadinya komunikasi dua arah antara masyarakat dan instansi terkait, khususnya BPBD Aceh Tenggara. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi masih tergolong belum optimal dan belum berjalan secara efektif.⁶⁵

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh sekretaris BPBD Kabupaten Aceh Tenggara:

*“Ruang untuk menerima masukan dari masyarakat tetap ada, namun pengetahuan masyarakat terhadap mitigasi masih kurang.”*⁶⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun mekanisme partisipasi telah tersedia, kualitas partisipasi masyarakat masih rendah karena keterbatasan pemahaman terhadap konsep mitigasi bencana. Dengan kata lain, masyarakat belum sepenuhnya mampu memberikan masukan yang bersifat teknis maupun strategis dalam upaya perbaikan kebijakan.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa mereka sebenarnya telah berupaya untuk berpartisipasi dalam proses evaluasi, terutama dengan memberikan informasi terkait kondisi wilayah yang rawan banjir. Masyarakat sebagai pihak yang secara langsung mengalami dampak bencana memiliki pengetahuan lokal (local knowledge) yang sangat penting, seperti lokasi genangan, penyebab banjir, serta perubahan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari pernyataan Rizani Pagan, informan di kecamatan Babel:
 

*“Memberi masukan kepada BPBD sering dilakukan mengenai daerah rawan banjir supaya segera ditindaklanjuti, namun kebanyakan masyarakat yang masih kurang kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana banjir di wilayah ini, contohnya saja banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan di aliran sungai, irigasi, membangun rumah diatas irigasi, macamlah daerah sini.”*⁶⁷

Namun demikian, partisipasi tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kebijakan mitigasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam berpartisipasi secara aktif.

⁶⁵ Rina Fitri, "Mitigasi Bencana Banjir" (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2023).

⁶⁶ Wawancara dengan Zulsapri Desky, 24 November 2025.

⁶⁷ Wawancara dengan Rizani Pagan, 25 November 2025.

Adapun beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Sebagian besar masyarakat lebih memprioritaskan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi ini menyebabkan keterlibatan dalam kegiatan evaluasi, seperti pertemuan atau forum diskusi, menjadi terbatas karena keterbatasan waktu dan kesempatan.

2. Faktor Pengetahuan dan Edukasi

Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai mitigasi bencana menyebabkan mereka kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapat atau masukan. Selain itu, kurangnya edukasi yang berkelanjutan membuat masyarakat belum memahami pentingnya peran mereka dalam proses evaluasi kebijakan.

3. Faktor Kesadaran Lingkungan

Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan juga menjadi kendala dalam partisipasi. Perilaku seperti membuang sampah sembarangan dan penebangan hutan secara ilegal justru memperparah risiko banjir.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Asrul Sani, informan di Kecamatan Bukit Tusam:

“Kendalanya masyarakat sibuk mencari nafkah, masih banyak yang menebang hutan dan membuang sampah sembarangan.”⁶⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan partisipasi tidak hanya berkaitan dengan aspek kelembagaan, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Selain itu, keterbatasan dalam mekanisme tindak lanjut terhadap masukan masyarakat juga menjadi faktor yang menyebabkan partisipasi dalam evaluasi kurang efektif. Masyarakat cenderung merasa bahwa masukan yang diberikan belum sepenuhnya diakomodasi dalam kebijakan, sehingga menurunkan motivasi

untuk berpartisipasi secara aktif di masa mendatang⁶⁹.

Seperti pernyataan Ajran Pikri, informan Kecamatan Babel:

*"Banyak masukan-masukan yang kami berikan kepada pihak pemerintah terutama, terkait mengenai rawannya banjir daerah sini, namun ada yang ditindak lanjuti cepat ada yang belum sampai sekarang, seperti pembangunan jembatan Desa Kuning I yang menjadi pusat tertumpuknya berondolan kayu dari gunung setiap hujannya sehingga menyebabkan air naik dan membanjiri jalanan, rumah kami".*⁷⁰

Pada tahap evaluasi mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat evaluasi pascabanjir, penyampaian masukan kepada pemerintah desa dan BPBD, serta keterlibatan dalam pendataan kerusakan akibat banjir. Masyarakat juga memberikan informasi mengenai lokasi yang masih rawan banjir dan mengusulkan langkah-langkah perbaikan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang. Meskipun masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan penilaian terhadap program mitigasi yang telah dilaksanakan, proses pengambilan keputusan akhir masih didominasi oleh pemerintah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi masih berada pada tingkat konsultasi (consultation) dalam Tangga Partisipasi Arnstein.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat ruang partisipasi dalam tahap evaluasi, keterlibatan masyarakat masih bersifat terbatas dan belum berpengaruh signifikan terhadap proses perbaikan kebijakan mitigasi bencana banjir. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi kebencanaan, penguatan forum komunikasi, serta penyediaan mekanisme evaluasi yang lebih partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

4.9 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perspektif Teori Arnstein

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada setiap tahapan mitigasi bencana banjir, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Aceh Tenggara masih berada pada level Tokenism (partisipasi semu) sebagaimana yang dikemukakan dalam teori tangga partisipasi oleh Sherry R. Arnstein .

⁶⁹ Rina Fitri, "Mitigasi Bencana Banjir" (Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2023), hlm. 78

⁷⁰ Wawancara dengan Ajran Pikri, 30 November 2025.

Arnstein dalam artikelnya *A Ladder of Citizen Participation* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya sekadar keterlibatan secara formal, tetapi berkaitan erat dengan distribusi kekuasaan (*distribution of power*) dalam proses pengambilan keputusan publik⁷¹. Pada tingkat *Tokenism*, masyarakat telah dilibatkan, namun belum memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan secara nyata.

Dalam penelitian ini, analisis tingkat partisipasi masyarakat dilakukan dengan menggunakan teori tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein. Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dapat dibagi ke dalam delapan tingkatan yang dikenal dengan istilah *Ladder of Citizen Participation*. Delapan tingkatan tersebut meliputi *manipulation*, *therapy*, *informing*, *consultation*, *placation*, *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control*. Tingkatan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga kategori utama yaitu *Non Participation*, *Tokenism*, dan *Citizen Power*.⁷²

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada level ini masyarakat telah memperoleh beberapa bentuk keterlibatan, antara lain:

1. Mendapatkan informasi melalui sosialisasi

Pemerintah melalui BPBD telah melaksanakan kegiatan sosialisasi mitigasi bencana secara rutin. Hal ini sejalan dengan konsep *informing* dalam *Tokenism*, dimana masyarakat diberikan informasi sebagai bentuk partisipasi awal

2. Dilibatkan dalam kegiatan pelaksanaan

Masyarakat terlibat dalam kegiatan seperti gotong royong dan pembersihan lingkungan. Namun, keterlibatan ini masih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi aktif yang berbasis kesadaran. Menurut Samuel Paul (1987), partisipasi yang bersifat mobilisasi cenderung tidak berkelanjutan karena tidak didasarkan pada kesadaran dan pemberdayaan masyarakat.

3. Diberi ruang untuk menyampaikan pendapat

Masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan, yang termasuk dalam kategori *consultation*. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Arnstein (1969), pada tahap ini masyarakat hanya didengar tanpa jaminan

⁷¹ Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969):

⁷² Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216–224.

bahwa pendapatnya akan diakomodasi dalam kebijakan.

Meskipun demikian, keterlibatan tersebut belum mencerminkan partisipasi yang substansial. Hal ini dapat dilihat dari beberapa keterbatasan berikut:

1. Tidak adanya kekuasaan dalam pengambilan keputusan

Keputusan strategis masih didominasi oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum mencapai tingkat partnership atau berbagi kekuasaan.

2. Minimnya peran dalam tahap perencanaan

Perencanaan kebijakan masih bersifat top-down. Menurut Robert Chambers, pendekatan top-down cenderung mengabaikan pengetahuan lokal masyarakat sehingga kurang efektif dalam pembangunan berbasis komunitas.

3. Tidak adanya kendali terhadap program mitigasi

Masyarakat belum memiliki kewenangan dalam mengontrol maupun mengevaluasi program. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi belum mencapai tingkat citizen control.⁷³ Secara teoritis, Arnstein menyatakan bahwa partisipasi yang ideal berada pada tingkat Citizen Power, yang mencakup partnership, delegated power, dan citizen control. Pada tingkat ini, masyarakat memiliki kekuasaan nyata dalam menentukan kebijakan serta terlibat aktif dalam seluruh tahapan pembangunan.

Jika dikaitkan dengan hasil penelitian, terdapat indikasi awal menuju tingkat tersebut, terutama dari adanya pengakuan pemerintah terhadap pentingnya peran masyarakat dalam mitigasi bencana. Hal ini sejalan dengan pendapat John M. Bryson yang menyatakan bahwa keterlibatan stakeholder merupakan kunci dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik.⁷⁴

Namun demikian, potensi tersebut belum diikuti dengan implementasi yang nyata dalam kebijakan. Partisipasi yang terjadi masih bersifat prosedural, belum substantif. Dalam perspektif pembangunan partisipatif, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berada pada posisi sebagai objek pembangunan, bukan subjek utama⁷⁵

⁷⁴ John M. Bryson, *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations*, ed. ke-3 (San Francisco: Jossey-Bass, 2004), hlm. 47.

⁷⁵ Robert Chambers, "The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal," *World Development* 22, no. 7 (1994): 959.

Selain itu, beberapa faktor yang menghambat peningkatan partisipasi menuju Citizen Power antara lain:

- a. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang mitigasi bencana
- b. Keterbatasan ekonomi masyarakat
- c. Rendahnya kesadaran lingkungan
- d. Pola kebijakan pemerintah yang masih dominan top-down

Hal ini sejalan dengan pendapat Norman Uphoff yang menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor kapasitas, kesempatan, dan kemauan masyarakat untuk terlibat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara masih berada pada tahap Tokenism, dengan kecenderungan menuju Citizen Power, namun belum mencapai tingkat tersebut secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan, peningkatan kapasitas, serta perubahan paradigma kebijakan dari top-down menjadi partisipatif. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi aktor utama dalam upaya mitigasi bencana secara berkelanjutan. Jika dianalisis menggunakan teori tangga partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara dapat dikategorikan ke dalam tingkat Tokenism⁷⁶. Pada tingkat ini masyarakat telah diberikan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai program pemerintah serta terlibat dalam beberapa kegiatan yang berkaitan dengan mitigasi bencana, namun masyarakat belum memiliki kekuasaan atau kewenangan dalam proses pengambilan keputusan.⁷⁷

Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Arnstein merumuskan delapan tangga partisipasi (eight rungs of participation). Agar analisis tidak berhenti pada tiga kategori besar (Non-Participation, Tokenism, Citizen Power) saja, temuan penelitian pada bagian ini diuraikan secara eksplisit untuk kedelapan tangga tersebut, mulai dari manipulation hingga citizen control, berdasarkan bukti yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

⁷⁶

Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*

⁷⁷

Sherry Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners*

Tabel 4.3 Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Delapan Tangga Arnstein

Tangga Arnstein	Bukti dari Data Lapangan	Status
Manipulation	Tidak ditemukan indikasi masyarakat dijadikan alat legitimasi formal tanpa keterlibatan substantif.	Tidak ditemukan
Therapy	Sosialisasi BPBD bersifat informatif untuk kesiapsiagaan, bukan untuk meredam/menenangkan situasi sosial.	Tidak ditemukan
Informing	BPBD melaksanakan sosialisasi mitigasi bencana secara rutin kepada masyarakat (komunikasi satu arah).	Ditemukan
Consultation	Masyarakat diberi ruang menyampaikan usulan dan masukan pada tahap perencanaan dan evaluasi melalui rapat/musyawarah, tanpa jaminan diakomodasi dalam keputusan akhir.	Ditemukan
Placation	Masyarakat dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan (gotong royong, normalisasi sungai), namun tidak ditemukan bukti representasi formal masyarakat dalam struktur/tim pengambilan keputusan BPBD.	Ditemukan sebagian
Partnership	Keputusan strategis mitigasi tetap didominasi oleh pemerintah daerah dan BPBD; tidak ditemukan mekanisme berbagi kewenangan setara dengan masyarakat.	Tidak ditemukan
Delegated Power	Tidak ditemukan pendelegasian kewenangan pengelolaan program mitigasi (mis. sistem peringatan dini, pengawasan lingkungan) kepada masyarakat.	Tidak ditemukan
Citizen Control	Masyarakat tidak memiliki kendali atas perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program mitigasi bencana banjir.	Tidak ditemukan

Sumber: Hasil analisis peneliti berdasarkan teori Arnstein (1969) dan data hasil wawancara penelitian, 2025.

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dipetakan ke delapan tingkatan Tangga Partisipasi Arnstein, partisipasi masyarakat dalam program mitigasi bencana banjir yang dilaksanakan BPBD berada pada kategori **tokenisme (tokenism)**, khususnya pada rung *informing* dan *consultation*, dengan indikasi awal menuju *placation* yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Pada tingkat *informing*, BPBD secara rutin melaksanakan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat. Namun, pola komunikasi ini bersifat satu arah informasi mengalir dari pemerintah ke masyarakat tanpa mekanisme umpan balik yang setara. Pada tingkat *consultation*, masyarakat memang diberi ruang menyampaikan usulan melalui forum musyawarah, tetapi tidak ditemukan bukti bahwa usulan tersebut memiliki jaminan struktural untuk diakomodasi dalam keputusan akhir. Kondisi ini konsisten dengan kritik Arnstein terhadap *consultation*

sebagai bentuk partisipasi yang rawan menjadi sekadar ritual administratif (*window-dressing*) apabila tidak disertai kewajiban formal bagi pemegang kekuasaan untuk merespons masukan tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan gotong royong dan normalisasi sungai menunjukkan adanya kontribusi tenaga kerja masyarakat dalam pelaksanaan program. Namun, kontribusi ini perlu dibedakan secara tegas dari partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masyarakat berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan, bukan sebagai pihak yang memiliki representasi formal dalam struktur atau tim pengambil keputusan BPBD. Oleh karena itu, kategori ini diklasifikasikan sebagai *placation* secara parsial mendekati definisi tersebut namun belum memenuhi kriteria representasi kelembagaan sebagaimana dimaksud Arnstein.

Absennya bukti pada tiga ruang tertinggi *partnership*, *delegated power*, dan *citizen control* mengindikasikan bahwa kewenangan strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program mitigasi banjir tetap sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah dan BPBD. Tidak ditemukan mekanisme pembagian kewenangan, negosiasi setara, maupun pendelegasian kontrol program kepada masyarakat, seperti pengelolaan sistem peringatan dini secara mandiri oleh komunitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pola partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di lokasi penelitian ini belum beranjak dari tahap *tokenism* menuju *citizen power*. Masyarakat dilibatkan secara informatif dan sebagian konsultatif, tetapi belum memiliki kuasa substantif atas keputusan yang memengaruhi keberlanjutan program mitigasi di wilayah mereka sendiri.

4.10 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling mempengaruhi. Faktor-faktor ini tidak hanya bersifat tunggal, melainkan saling berkaitan antara aspek sosial, ekonomi, kelembagaan, dan kebijakan. Oleh karena itu, untuk memahami rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut.

a. Faktor Pengetahuan

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan partisipasi. Sebagian besar masyarakat belum memahami secara menyeluruh pentingnya mitigasi sebagai upaya

pencegahan sebelum terjadinya bencana, sehingga partisipasi yang muncul cenderung bersifat reaktif, yaitu setelah bencana terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas masyarakat dalam aspek pengetahuan masih terbatas. Menurut Sherry R. Arnstein, partisipasi yang bermakna hanya dapat terjadi apabila masyarakat memiliki kemampuan dan pemahaman yang cukup untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.⁷⁸

Selain itu, Norman Uphoff menegaskan bahwa salah satu prasyarat utama partisipasi adalah adanya kapasitas (*capacity*), yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran masyarakat. Tanpa kapasitas tersebut, masyarakat akan kesulitan untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif.⁷⁹

Dengan demikian, rendahnya tingkat edukasi kebencanaan menjadi penghambat utama dalam mendorong partisipasi yang lebih substantif.

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi pengaruh signifikan terhadap rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian besar masyarakat di lokasi penelitian lebih memprioritaskan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga keterlibatan dalam kegiatan mitigasi menjadi terbatas.

Kondisi ini menyebabkan partisipasi masyarakat lebih bersifat selektif dan situasional, tergantung pada ketersediaan waktu dan kondisi ekonomi. Dalam konteks ini, partisipasi seringkali dianggap sebagai kegiatan tambahan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi. Menurut Samuel Paul, faktor ekonomi merupakan salah satu determinan utama dalam partisipasi masyarakat, dimana masyarakat dengan tekanan ekonomi tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi yang rendah karena lebih fokus pada kebutuhan dasar.⁸⁰ Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan atau insentif yang memadai, sulit bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan mitigasi bencana.

⁷⁹ Norman Uphoff, *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and Post-Newtonian Social Science* (Ithaca: Cornell University Press, 1992), hlm. 34.

⁸⁰ Samuel Paul, "Community Participation in Development Projects: The World Bank Experience," World Bank Discussion Papers, No. 6 (Washington, DC: World Bank, 1987), hlm. 22.

c. Faktor Lingkungan dan Perilaku

Faktor lingkungan dan perilaku masyarakat juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi. Perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan dan melakukan penebangan hutan, tidak hanya meningkatkan risiko banjir tetapi juga menunjukkan rendahnya kesadaran ekologis.

Dalam konteks mitigasi bencana, perilaku masyarakat merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan program. Menurut Robert Chambers (1994), pembangunan berbasis partisipasi harus mampu mengubah perilaku masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran.⁸¹ Selain itu, rendahnya kesadaran lingkungan juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum mencapai tahap internalisasi nilai, dimana masyarakat secara sadar dan sukarela menjaga lingkungan sebagai bagian dari mitigasi bencana. Dengan demikian, perubahan perilaku menjadi salah satu aspek penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

d. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah yang masih bersifat top-down menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam partisipasi masyarakat. Dalam pendekatan ini, pemerintah lebih dominan dalam menentukan kebijakan, sementara masyarakat hanya menjadi penerima kebijakan (policy recipient). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat belum dilibatkan secara aktif dalam tahap perencanaan, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal belum sepenuhnya terakomodasi. Kondisi ini menyebabkan rendahnya rasa memiliki (sense of ownership) masyarakat terhadap program mitigasi.

Menurut John M. Bryson, keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat, merupakan faktor penting dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik. Tanpa keterlibatan tersebut, kebijakan cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.⁸² Sejalan dengan itu, Arnstein juga menegaskan bahwa partisipasi yang hanya bersifat formal tanpa adanya distribusi kekuasaan akan menghasilkan partisipasi semu (Tokenism). Dengan demikian, perubahan pendekatan kebijakan dari top-down menuju bottom-up menjadi sangat penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

⁸¹ Robert Chambers, "Participatory Rural Appraisal," *World Development* 22 (1994): 965.

e. Faktor Kelembagaan Lokal

Kelembagaan lokal, khususnya peran kepala desa, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam mendorong partisipasi masyarakat. Kepala desa menjadi aktor utama dalam mengorganisasi kegiatan seperti gotong royong dan sosialisasi di tingkat desa. Peran kelembagaan lokal ini belum terintegrasi secara optimal dengan kebijakan yang dijalankan oleh BPBD. Akibatnya, kegiatan yang dilakukan di tingkat desa cenderung berjalan secara parsial dan belum terkoordinasi secara sistematis.

Menurut Norman Uphoff, kelembagaan lokal memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat karena kedekatannya dengan masyarakat. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada koordinasi dengan lembaga formal pemerintah.⁸³ Dengan demikian, penguatan kelembagaan lokal serta integrasi dengan kebijakan pemerintah menjadi langkah penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Menurut peneliti, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan masyarakat itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh pendekatan kebijakan yang masih cenderung bersifat top-down. Peneliti berpendapat bahwa peningkatan efektivitas mitigasi bencana tidak akan tercapai secara optimal tanpa adanya pelibatan masyarakat secara aktif dan berkelanjutan dalam setiap tahapan mitigasi, khususnya pada tahap perencanaan dan evaluasi.

Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma kebijakan menuju pendekatan bottom-up yang lebih partisipatif, melalui peningkatan edukasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan peran tokoh lokal sebagai penggerak partisipasi. Dengan demikian, peneliti meyakini bahwa partisipasi masyarakat yang saat ini masih berada pada tingkat Tokenism dapat ditingkatkan menuju Citizen Power, dimana masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki kesadaran, kapasitas, dan kemandirian dalam menghadapi risiko bencana banjir secara berkelanjutan.

⁸³ Norman Uphoff, *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and Post-Newtonian Social Science* (Ithaca: Cornell University Press, 1992), hlm. 128.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan penanggulangan bencana, antara lain sosialisasi kebencanaan, penyusunan dokumen perencanaan, kegiatan kesiapsiagaan, koordinasi penanggulangan bencana, serta pelibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mengurangi risiko banjir. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat masih cenderung bersifat top-down, sehingga masyarakat belum memperoleh ruang dan kewenangan yang memadai dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Masyarakat lebih banyak ditempatkan sebagai penerima informasi, pemberi masukan, dan pelaksana kegiatan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya koordinasi antarinstansi, belum berkelanjutannya program pemberdayaan masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat belum sepenuhnya mampu menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam mitigasi bencana dan masih perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif.
2. Partisipasi masyarakat dalam kebijakan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara secara keseluruhan masih berada pada tingkat Tokenism atau partisipasi semu berdasarkan teori tangga partisipasi Sherry R. Arnstein. Pada tahap perencanaan, masyarakat telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan informasi mengenai kondisi wilayah rawan banjir, tetapi belum memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan akhir. Pada tahap pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi melalui kegiatan gotong royong, pembersihan lingkungan, dan kegiatan pengurangan risiko bencana, namun keterlibatannya masih cenderung bersifat mobilisasi. Pada tahap evaluasi, masyarakat telah dilibatkan melalui rapat pascabanjir, penyampaian masukan, pendataan kerusakan, dan penyampaian informasi mengenai wilayah rawan banjir, tetapi keputusan akhir terhadap tindak lanjut masih didominasi pemerintah. Kondisi tersebut

menunjukkan bahwa masyarakat telah memperoleh ruang untuk berpartisipasi, terutama melalui pemberian informasi dan konsultasi, tetapi belum mencapai tingkat partnership, delegated power, maupun citizen control.



5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melalui BPBD perlu memperkuat kebijakan mitigasi bencana yang berbasis partisipasi masyarakat dengan mengubah pola pelibatan dari pendekatan top-down menuju pendekatan yang lebih partisipatif, kolaboratif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pelibatan masyarakat perlu dilakukan secara konsisten pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Masyarakat perlu diberikan ruang yang lebih luas untuk menentukan kebutuhan dan prioritas program, tidak hanya dilibatkan sebagai pelaksana kegiatan. Pemerintah juga perlu meningkatkan edukasi kebencanaan melalui sosialisasi berkelanjutan, pelatihan, simulasi, serta penguatan kelompok masyarakat siaga bencana. Selain itu, diperlukan mekanisme yang jelas dalam menerima, menindaklanjuti, dan memberikan umpan balik terhadap aspirasi masyarakat. Penguatan koordinasi antara BPBD, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, dan organisasi masyarakat juga diperlukan agar mitigasi bencana dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
2. Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara perlu meningkatkan kesadaran, kapasitas, dan keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan mitigasi bencana banjir. Partisipasi masyarakat hendaknya tidak hanya muncul ketika bencana terjadi, tetapi dibangun sejak tahap pencegahan dan kesiapsiagaan melalui keikutsertaan dalam sosialisasi, pelatihan, simulasi kebencanaan, forum musyawarah, kegiatan gotong royong, menjaga kebersihan lingkungan, menjaga saluran air, serta menyampaikan informasi mengenai wilayah yang berpotensi mengalami banjir kepada pemerintah. Tokoh masyarakat, pemuda, dan kelompok masyarakat diharapkan dapat menjadi penggerak partisipasi di tingkat lokal dengan memanfaatkan semangat gotong royong dan kearifan lokal. Masyarakat juga perlu memanfaatkan ruang partisipasi yang diberikan pemerintah untuk menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program mitigasi. Dengan peningkatan kapasitas dan kesadaran tersebut, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima manfaat kebijakan, tetapi dapat berkembang menjadi aktor utama dalam pengurangan risiko bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anderson, J. E. (2006). *Public Policymaking: An Introduction* (6th ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Bryson, J. M. (2004). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations* (3rd ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.). Boston: Pearson.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Paul, S. (1987). *Community Participation in Development Projects: The World Bank Experience*. Washington, DC: World Bank.
- Pusponegoro, A. D., & Sujudi, A. (2016). *Kegawatdaruratan Dan Bencana: Solusi Dan Petunjuk Teknis Penanggulangan Medik & Kesehatan*. Jakarta: PT Rayyana Komu-nikasindo.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Uphoff, Norman. (1992). *Learning from Gal Oya: Possibilities for Participatory Development and Post-Newtonian Social Science*. Ithaca: Cornell University Press.

Skripsi dan Jurnal:

- Agustina, et al. (2020). Pendampingan Mitigasi Gempa Berbasis Pengetahuan Lokal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1).
- Anderson, James E. 2006. *Public Policymaking: An Introduction*. Edisi ke-6. Boston: Houghton Mifflin.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal Of The American Planning Association*, 35(4).
- Chambers, R. (1994). The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. *World Development*, 22(7), 953–969.
- Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah, Vol. 1(2), 384.
- Erni Yusnita. (2024). Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir Oleh BPBD Kabupaten Aceh Tenggara. Skripsi, FISIP, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Fitri, R. (2023). Mitigasi Bencana Banjir. Skripsi S1, Universitas Lampung.
- Hapsari, D. A. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Banjir Rob. Skripsi, UIN

Walisongo.

- Muhammad Rifqi. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Indonesia. Tesis, IPDN.
- Nurhalimah, A. (2018). Partisipasi Kaum Perempuan Dalam Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, Vol. 6 No. 2.
- Permana, D. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Risiko Bencana Alam Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 156–165.
- Rahma, A. N., & Purbaningrum, D. G. (2024). Partisipasi Masyarakat Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Perumahan Bukit Sawangan Indah Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 3(3), 88–109.
- Rahman, A., et al. (2024). A Comprehensive Bibliometric and Content Analysis of Artificial Intelligence in Language Learning: Tracing Between the Years 2017 and 2023. *Artificial Intelligence Review*, 57(4).
- Rifqi, Muhammad. Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Indonesia. Tesis, IPDN, 2022.
- Sularso, Octavianus, & Suryono. (2021). Mitigasi Risiko Bencana Banjir Di Manado. *Jurnal Spasial*, 8(2), 267–274.
- Tim Peneliti. Mitigasi Banjir Kecamatan Leuser. Laporan Penelitian, 2018.

Situs dan dokumen resmi:

- AJNN. (2025). Data Update BPBD Aceh Tenggara: 101 Desa Diterjang Banjir, Korban Terdampak Bertambah. Diakses dari <https://www.ajnn.net/news/data-update-bpbd-aceh-tenggara-101-desa-diterjang-banjir-korban-terdampak-bertambah/>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Peraturan Kepala BNPB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. <https://bnpb.go.id>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Laporan Tahunan Bencana 2020–2025. <https://bpbd.acehtenggarakab.go.id/publikasi/laporan-tahunan>
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tenggara. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Tahun 2024.
- Badan Penanggulangan Bencana Aceh. “Akibat Hujan Tinggi: 8 Desa di 3 Kecamatan Aceh Tenggara Terendam Banjir.” <https://bpba.acehprov.go.id/berita/kategori/bencana/akibat-hujan-intensitas-tinggi-di-aceh-tenggara-8-desa-di-3-kecamatan-terendam-banjir>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. Kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara

Tahun 2025.

<https://acehtenggarakab.bps.go.id/statistik>

BPBD Aceh Tenggara. (2025). Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana. Kutacane: BPBD Aceh Tenggara.

Banjir Dominasi Bencana Alam Indonesia 2024. (2025, April 29). Goodstats. <https://data.goodstats.id/statistic/banjir-dominasi-bencana-alam-indonesia-2024-DH6lL>

Berutu, R. O. (2024). 3.236 Jiwa Terdampak Banjir Aceh Tenggara. Aceh Online. <https://www.acehonline.co/news/3-236-jiwa-terdampak-banjir-aceh-tenggara/index.html>

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Degradasi Lingkungan dan Banjir. <https://www.menlhk.go.id>

Mitigasi Bencana. (2024, Januari 20). Gramedia Literasi. <https://www.gramedia.com/literasi/mitigasi-bencana/>

Mitigasi Bencana. (2024, Desember 16). Pengadilan Tinggi Agama Padang. <https://www.pta-padang.go.id/pages/mitigasi-bencana>

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. “Peta dan Topografi Aceh Tenggara.” <https://acehtenggarakab.go.id/halaman/peta-dan-topografi>

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. (2025, April 29). Penanganan Masa Transisi Banjir, 9 Kecamatan Di Aceh Tenggara. BPBD Aceh Tenggara. <https://bpbd.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/cuaca-ekstrim/penanganan-masa-transisi-banjir-9-kecamatan-di-aceh-tenggara>

Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. (2025, April 29). Aceh Tenggara Diterjang Banjir Bandang, 5 Kecamatan Terendam Air. BPBD Aceh Tenggara. <https://bpbd.acehtenggarakab.go.id/berita/kategori/cuaca-ekstrim/aceh-tenggara-diterjang-banjir-bandang-5-kecamatan-terendam-air>

Tribun Aceh. “Data BPBD: Kerusakan Infrastruktur Banjir Bandang Aceh Tenggara 2025.” <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1004452/data-bpbd-kerusakan-infrastruktur-rumah-sekolah-dan-pesantren-dampak-banjir-bandang-aceh-tenggara>

Tribun Aceh. “Banjir Bandang Aceh Tenggara, 1.911 Rumah Rusak.” 17 Desember 2025. <https://aceh.tribunnews.com/nanggroe/1002777/banjir-bandang-aceh-tenggara-1911-rumah-rusak-ini-rinciannya>

Undang-undang dan peraturan:

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Bencana.

Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Daerah.



Lampiran 1 surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-2880/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/11/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Aceh Tenggara

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802100

Nama : MHD. IQBAL

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : JALAN TERUTUNG PAYUNG MBAK SAKO KUTA LENGAT PAGAN
KUTA LENGAT PAGAN

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**

Banda Aceh, 06 November 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



معة الرانري

A R - R A N I R Y

Berlaku sampai : 27 Februari 2026

Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Balasan Surat Izin Penelitian

		PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jl. Kutacane - Medan Km. 2,8 Telp. 0829-21741 Fax. 0829-21032 kode Pos 24671 @Email : bpbda.gara@gmail.com KUTACANE			
Nomor	:360/ 570 /BPBD/XI/2025	Kepada Yth:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan		
Lamp	:-		Ilmu Pemerintahan		
Perihal	:Permohonan Izin Penelitian		Universitas Islam Negeri Ar - Raniry		
			Di-		
			Tempat.		

1. Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: B-2880/Un.08/FISIF.I/PP.00.9/11/2025 tanggal 06 november 2025 Tentang Penelitian Ilmiah Mahasiswa.
2. Sehubungan hal di atas, dapat kami sampaikan bahwa Saudara MHD. IQBAL NIM 220802100 telah Melakukan Penelitian Ilmiah di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tenggara dengan judul **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR DI KABUPATEN ACEH TENGGARA**
3. Demikian Surat Balasan Izin Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan semestinya

Kutacane, 28 November 2025
 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 Kabupaten Aceh Tenggara
 Sekretaris,


ZULSAPRI DESKY, S.E., M.M
 Pembina PK.I (IV/b)
 Nip. 19801026 200212 1 008


 جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Lampiran 2 Pertanyaan Wawancara

Informan: BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

No	Pertanyaan	Tujuan
1	Apa saja program mitigasi banjir yang telah dilakukan oleh BPBD di Kabupaten Aceh Tenggara?	Menggali bentuk kebijakan dan program pemerintah
2	Sejak kapan program-program tersebut dilaksanakan dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya?	Memahami durasi dan tahapan pelaksanaan
3	Bagaimana strategi BPBD dalam melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan mitigasi (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi)?	Mengukur tingkat pelibatan masyarakat
4	Apakah masyarakat diberi ruang untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan mitigasi banjir?	Menilai partisipasi masyarakat di tingkat kebijakan
5	Bagaimana komunikasi BPBD dengan pemerintah kecamatan dan desa dalam pelaksanaan program mitigasi?	Menilai koordinasi antar lembaga
6	Apa kendala utama yang dihadapi BPBD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?	Mengidentifikasi faktor penghambat
7	Apakah BPBD memiliki	Melihat upaya edukasi

	program sosialisasi atau pelatihan mitigasi bencana kepada masyarakat?	publik
8	Seberapa sering BPBD melakukan sosialisasi dan evaluasi terkait mitigasi banjir di daerah rawan seperti Babel, Lawe Sumur, dan Bukit Tusam?	Menilai frekuensi dan pemerataan kegiatan
9	Bagaimana bentuk kolaborasi BPBD dengan lembaga lain seperti dinas lingkungan, camat, dan kepala desa?	Menggali aspek collaborative governance
10	Apa kebijakan BPBD dalam melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda dalam kegiatan mitigasi?	Menilai pendekatan sosial budaya
11	Apakah BPBD menyediakan insentif atau penghargaan bagi masyarakat yang aktif dalam mitigasi?	Menilai dukungan motivasional
12	Menurut BPBD, sejauh mana masyarakat memiliki kontrol atau kekuasaan nyata dalam kegiatan mitigasi banjir?	Mengukur tingkat partisipasi (Arnstein's Ladder)

Informan: Camat (Kecamatan Babel, Lawe Sumur, Bukit Tusam)

No	Pertanyaan	Tujuan
----	------------	--------

1	Bagaimana peran pemerintah kecamatan dalam mendukung program mitigasi banjir di wilayah ini?	Menggali fungsi koordinatif camat
2	Apakah ada forum koordinasi antara pemerintah kecamatan, desa, dan BPBD?	Menilai mekanisme pelaksanaan kebijakan
3	Bagaimana bentuk pelibatan masyarakat yang dilakukan di tingkat kecamatan?	Menilai bentuk partisipasi lokal
4	Apa bentuk sosialisasi yang pernah dilakukan pemerintah kecamatan tentang mitigasi banjir?	Melihat upaya penyadaran masyarakat
5	Menurut Anda, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat di wilayah ini terhadap bahaya banjir dan pentingnya mitigasi?	Menilai tingkat kesadaran masyarakat
6	Apa saja kendala yang dihadapi kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat?	Mengidentifikasi hambatan
7	Bagaimana camat menilai efektivitas kebijakan BPBD dalam pelaksanaan mitigasi di wilayahnya?	Menilai efektivitas kebijakan
8	Apakah camat melibatkan	Mengukur tingkat

	tokoh masyarakat dalam perencanaan kegiatan mitigasi banjir?	kemitraan lokal
9	Sejauh mana masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan pendapat atau usulan dalam kegiatan mitigasi?	Mengukur partisipasi simbolik atau nyata
10	Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih aktif dan berkelanjutan?	Mendapatkan masukan kebijakan

Informan: Kepala Desa / Aparat Desa

No	Pertanyaan	Tujuan
1	Bagaimana kondisi wilayah desa Anda terkait risiko banjir?	Memahami konteks lokal
2	Apakah pemerintah desa memiliki program atau kegiatan mitigasi banjir sendiri?	Mengidentifikasi program lokal
3	Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut?	Menilai bentuk partisipasi
4	Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi kegiatan mitigasi banjir?	Mengukur tingkat partisipasi
5	Bagaimana koordinasi antara pemerintah desa	Menilai sinergi kelembagaan

	dengan kecamatan dan BPBD?	
6	Apa tantangan terbesar yang dihadapi dalam menggerakkan masyarakat ikut berpartisipasi?	Menggali hambatan sosial/ekonomi
7	Apakah ada sosialisasi atau pelatihan kebencanaan dari BPBD di desa Anda?	Menilai bentuk edukasi publik
8	Bagaimana masyarakat merespons kebijakan atau program mitigasi yang diterapkan pemerintah?	Menggali persepsi warga
9	Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat?	Menggali solusi lokal
10	Apakah nilai-nilai lokal seperti gotong royong atau adat istiadat membantu dalam kegiatan mitigasi banjir?	Menilai peran kearifan lokal

Informan: Masyarakat (Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Imeum Mukim, Warga Terdampak)

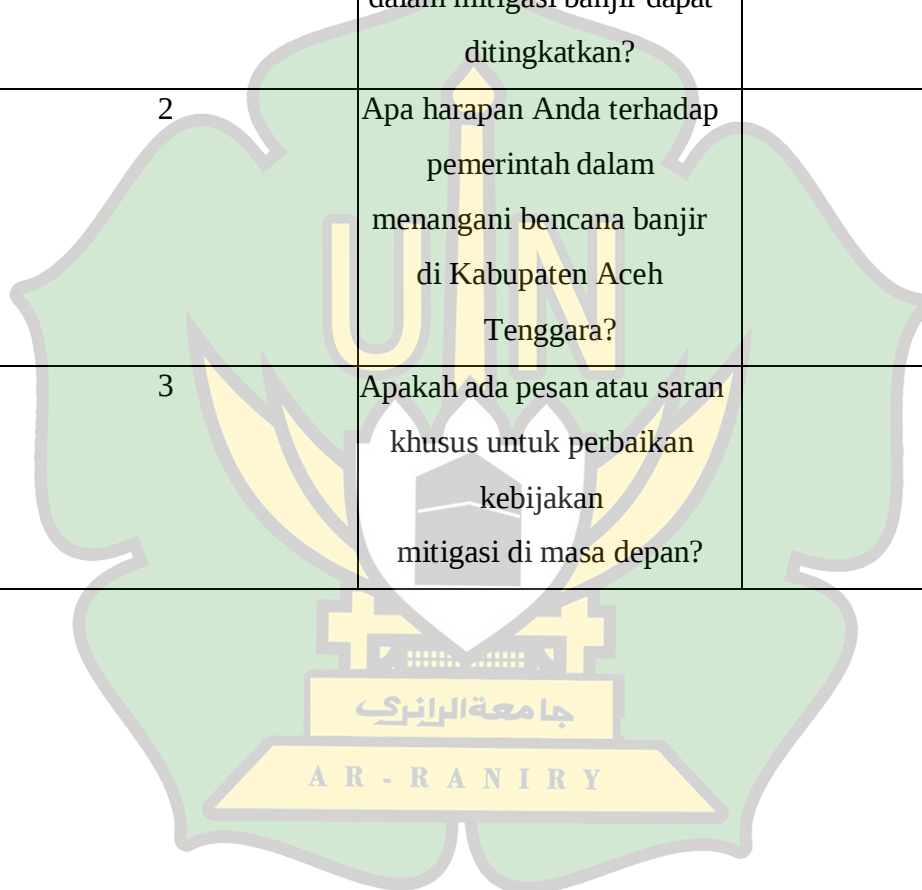
No	Pertanyaan	Tujuan
1	Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya program mitigasi banjir dari pemerintah atau BPBD?	Menilai tingkat pengetahuan
2	Apakah Bapak/Ibu pernah ikut terlibat dalam kegiatan	Mengukur bentuk partisipasi

	mitigasi seperti gotong royong, penghijauan, atau sosialisasi?	
3	Siapa yang biasanya mengajak atau mengorganisir kegiatan mitigasi di desa ini?	Mengetahui aktor penggerak
4	Apakah pendapat masyarakat pernah diminta atau didengar dalam perencanaan kegiatan mitigasi?	Mengukur tahap consultation
5	Apakah usulan masyarakat pernah diakomodasi atau dijalankan pemerintah?	Menilai partisipasi bermakna
6	Apa kendala yang membuat sebagian warga belum aktif dalam kegiatan mitigasi banjir?	Menggali faktor penghambat
7	Bagaimana pandangan masyarakat terhadap peran BPBD dan pemerintah desa selama ini?	Menilai kepercayaan masyarakat
8	Apakah kegiatan mitigasi banjir yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	Menilai relevansi program
9	Bagaimana dampak kegiatan mitigasi yang sudah dilakukan terhadap pengurangan risiko banjir?	Menilai efektivitas program
10	Menurut Anda, bagaimana seharusnya masyarakat	Menggali rekomendasi partisipatif

	dilibatkan?	
--	-------------	--

Pertanyaan Penutup (Untuk Semua Informan)

No	Pertanyaan	Tujuan
1	Menurut Anda, apa langkah paling penting agar partisipasi masyarakat dalam mitigasi banjir dapat ditingkatkan?	
2	Apa harapan Anda terhadap pemerintah dalam menangani bencana banjir di Kabupaten Aceh Tenggara?	
3	Apakah ada pesan atau saran khusus untuk perbaikan kebijakan mitigasi di masa depan?	



Lampiran 3 foto dokumentasi penelitian

Wawancara dengan Sekretaris Kantor BPBD Kabupaten Aceh
Tenggara Bapak Zulsapri Desky



Wawancara dengan beberapa masyarakat



Beberapa data dari BPBD Kabupaten Aceh Tenggara

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Mhd. Iqbal
2. Nim : 220802100
3. Tempat/Tanggal Lahir : Kute Lengat Pagan, 31 Desember 2004
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Desa Kute Lengat Pagan,
Kecamatan Bukit Tusam,
Kabupaten Aceh Tenggara
9. Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Tamizy S.Pd.i
 - b. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - c. Ibu : Maisarah S.Pd.i
 - d. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - e. Alamat Orang Tua : Desa Kute Lengat Pagan, Kecamatan Bukit
Tusam, Kabupaten Aceh Tenggara
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Kuta Lengat
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Babel
 - c. MAN : MA Negeri 1 Aceh Tenggara
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda
Aceh